



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa untuk penajaman dan sinergi program kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional ditugaskan untuk mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Tahunan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021-2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
2. Penyelenggaraan Rencana Aksi adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah

tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yang bertugas melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.

4. Dewan Pengarah Tim Koordinasi untuk selanjutnya disebut Dewan Pengarah adalah pimpinan kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.
5. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
7. Ketua Harian Tim Koordinasi adalah Menteri yang ditugaskan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan teknis Rencana Aksi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

Menteri menetapkan Rencana Aksi Tahun 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. pendahuluan; dan
 - b. matriks Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
- (2) Matriks Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. matriks bidang; dan
 - b. matriks program prioritas tinggi.
- (3) Matriks bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. bidang sumber daya manusia unggul, inovatif, berkarakter, dan kontekstual papua;
 - b. bidang transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir;
 - c. bidang infrastruktur dasar dan ekonomi;
 - d. bidang kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
 - e. bidang tata kelola pemerintahan, dan keamanan dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
- (4) Matriks program prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. program prioritas tinggi bidang sumber daya manusia unggul, inovatif, berkarakter, dan kontekstual Papua;
 - b. program prioritas tinggi bidang transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir;
 - c. program prioritas tinggi bidang infrastruktur dasar dan ekonomi;
 - d. program prioritas tinggi bidang kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
 - e. program prioritas tinggi bidang tata kelola Pemerintahan, dan keamanan dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
- (5) Matriks Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kesesuaian dengan prioritas nasional, rincian *output* (RO), lokus, target, tahun penyelesaian, sumber pendanaan, dan penanggung

jawab.

Pasal 4

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk:

- a. pedoman bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional untuk menajamkan, menyinergikan, dan mengoordinasikan kesesuaian dengan prioritas nasional, rincian output (RO), lokus, target, tahun penyelesaian, sumber pendanaan, dan penanggung jawab percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat beserta integrasi pendanaannya sebagai acuan dalam pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi;
- b. panduan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- c. pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga; dan
- d. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 5

Kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan/atau pemerintah kabupaten/kota melaksanakan Rencana Aksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Rencana Aksi secara teknis

dikoordinasikan oleh Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi.

- (2) Dalam rangka penyelarasan Penyelenggaraan Rencana Aksi dengan pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Menteri selaku ketua harian Tim Koordinasi berkoordinasi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Pasal 7

- (1) Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi tahun selanjutnya.

Pasal 8

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan menggunakan sistem informasi.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kementerian/lembaga pelaksana Rencana Aksi menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Aksi ke dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyampaian hasil pelaksanaan Rencana Aksi ke dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik 4 (empat) bulanan.
- (5) Dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pertemuan berkala antara kementerian/lembaga pelaksana Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Tim Koordinasi.

Pasal 9

- (1) Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 10

- (1) Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi menyusun laporan berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal terjadi perubahan pada kesesuaian dengan prioritas nasional, rincian output (RO), lokus, target, tahun penyelesaian, sumber pendanaan, dan penanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan penganggaran.
- (3) Menteri menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dewan Pengarah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Pendanaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rencana Aksi disusun pertama kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dalam periode Tahun 2021-2022.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1481

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI
PAPUA BARAT TAHUN 2021-2022

RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah merancang dan melaksanakan berbagai kebijakan untuk memajukan wilayah Papua dan mensejahterakan masyarakatnya. Kebijakan afirmasi ini semakin kuat dengan status otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Papua tahun 2001 dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian disusul dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan status otonomi khusus untuk Provinsi Papua Barat.

Setelah dua puluh tahun pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, kedua provinsi ini dinilai oleh Pemerintah belum mencapai hasil-hasil pembangunan yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang tetap tinggi, tingkat pendapatan rumah tangga yang rendah, serta pendidikan dan kesehatan yang belum memadai ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Sejak ditetapkannya kebijakan afirmasi untuk Papua dan Papua Barat tahun 2001 melalui UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pemerintah telah berulang kali menetapkan kebijakan afirmasi dalam

kaitannya dengan percepatan pembangunan Papua diantaranya dengan ditetapkannya:

1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat;
3. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat; dan
4. Instruksi Presiden Nomor No 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Selain kebijakan afirmasi tersebut di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat, maka pada tahun 2020 dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Keputusan Presiden nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat untuk mengawal pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Tim Koordinasi ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua dimana pendekatan secara menyeluruh dari sisi sosial ekonomi, politik dan budaya sangat diperlukan. Dalam pelaksanaannya, strategi pelaksanaan Inpres 9 tahun 2020 yang berfokus pada 11 strategi pendekatan, yaitu:

1. pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan yang berbasis data dan informasi;

2. pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP);
3. percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik (kecamatan) dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit di jangkau;
4. penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah;
5. pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan melibatkan peran serta masyarakat;
6. pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dan tokoh adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dan pengusaha lokal Papua;
8. peningkatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi dengan mitra pembangunan internasional, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya melalui instrumen kemitraan multi pihak;
9. peningkatan pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi;
10. Peningkatan kerjasama Pemerintah, TNI/Polri, Pemerintahan Daerah, tokoh dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan Wilayah Papua yang aman, stabil, dan damai; dan
11. penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Wilayah Papua.

Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga dilaksanakan dalam semangat transformasi otonomi khusus berlandaskan pendekatan afirmatif,

holistik, berkesetaraan gender, dan kontekstual Papua yang difokuskan pada 5 kerangka baru untuk Papua, yaitu:

1. percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul, inovatif dan berkarakter yang mempertimbangkan kontekstual Papua di seluruh wilayah Pulau Papua yang dikhususkan kepada Orang Asli Papua (OAP);
2. percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi Papua yang berkualitas dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keterkaitan antarwilayah, kota-kampung, wilayah adat, kemitraan antar pelaku ekonomi, dan potensi sektor-sektor ekonomi daerah yang dikelola secara terpadu dari hulu ke hilir yang terfokus kepada Orang Asli Papua (OAP);
3. percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu guna mendukung pelayanan publik dan transformasi ekonomi Papua di seluruh wilayah Pulau Papua;
4. peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon sesuai kearifan lokal, zona ekologis, dan penataan ruang wilayah di Pulau Papua dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
5. percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka penguatan otonomi khusus, pelayanan publik, demokrasi lokal yang inklusif, harmoni sosial, dan keamanan daerah yang aman dan stabil serta penghormatan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

B. MATRIKS RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

1. Matriks Bidang

a. Bidang SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter, dan Kontekstual Papua

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
1	3	3	1	Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN, DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
2	3	3	1		Pelayanan <i>Antenatal Care</i> (ANC)/ pemeriksaan selama kehamilan	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	90%	2021-2022	APBN, DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
3	3	3	1		Program rumah tunggu persalinan	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN, DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
4	3	3	1		Pelayanan persalinan tenaga kesehatan	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	91%	2021-2022	APBN, DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
5	3	3	1		Pelayanan <i>postpartum</i> /setelah kelahiran	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	90%	2021-2022	APBN, DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
6	3	3	1		Penguatan Puskesmas Poned	Lokus tahun 2021 adalah 11 puskesmas	11 Puskesmas	2021	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
7	3	3	1		Penguatan RS Ponek	Lokus tahun 2021 adalah 6 RS	6 RS	2021	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
8	3	3	1		Penguatan <i>public safety center</i> 119	1. Sorong 2. Mappi	2 Kab/Kota	2021	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
9	3	3	5		Fasilitasi dan Pembinaan Daerah pada Penyelenggaraan Pelayanan Ibu dan Anak	Provinsi Papua	1 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
10	3	3	2	Penurunan Stunting	Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	92%	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
11	3	3	2		Balita kurus mendapat makanan tambahan	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	92%	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
12	3	3	2		Pelaksanaan Surveilans Gizi	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
13	9	9	8		Tenaga kesehatan yang dilatih Pemantauan Pertumbuhan Balita	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	250 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
14	3	3	1		Pelatihan Pelayanan Pijat bayi dibawah dua tahun untuk Tumbuh Kembang Anak bagi Tenaga Kesehatan	Provinsi Papua	25 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
15	3	3	1		Pelatihan Pelayanan Pijat bayi dibawah dua tahun untuk Tumbuh Kembang Anak bagi Tenaga Kesehatan	Provinsi Papua Barat	25 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
16	3	3	5		Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	Provinsi Papua	6 Kelompok Masyarakat	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
17	3	3	5		Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	Provinsi Papua Barat	6 Kelompok Masyarakat	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
18	5	5	4		Penyediaan Antropometri Kit	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	90%	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
19	7	7	6		Tenaga Kesehatan yang dilatih Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	152 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
20	8	8	7		Tenaga kesehatan yang dilatih Pencegahan dan Tatalaksana Balita Gizi Buruk pada Balita	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	490 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
21	3	3	3	Pengendalian Penyakit Menular	Koordinasi pelaksanaan imunisasi di	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	4 Kegiatan	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Papua dan Papua Barat						
22	3	3	3		Surveilans KIPI di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	2 Layanan	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
23	3	3	3		Pendidikan dan pelatihan bidang imunisasi di Papua dan Papua Barat	3. Wilayah Adat Laa Pago 4. Wilayah Adat Domberay	137 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
24	3	3	3		Bimbingan teknis imunisasi di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	22 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
25	3	3	3		Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	8 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
26	3	3	3		Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	160 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
27	3	3	3		IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) di daerah sulit	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	200 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					kategori II (Wilayah Adat Laa Pago dan Domberay)						
28	3	3	3		Peningkatan SDM Malaria di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	2518 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
29	3	3	3		Bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	8 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
30	3	3	3		Surveilans dan deteksi dini penyakit malaria tingkat Wilayah Adat Laa Pago dan Domberay	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	40 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
31	3	3	3		IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	8 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
32	3	3	3		Survei Daerah Massal Malaria (angka parasite rate) Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	4 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
33	3	3	3		Peningkatan SDM Kab/Kota Endemis tinggi malaria Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	77 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
34	3	3	3		Pra Assessment eliminasi malaria Kab/Kota Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
35	3	3	3		Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	12 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
36	3	3	3		Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	23 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
37	3	3	3		Surveilans dan deteksi dini penyakit filariasis dan kecacingan di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	62 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
38	3	3	3		Pelaksanaan POPM filariasis dan kecacingan di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	8 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
39	3	3	3		Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	80 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
40	3	3	3		Peningkatan SDM pengendalian filariasis dan kecacingan di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	10 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
41	3	3	3		Bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	7 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
42	3	3	3		Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit TB di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	4 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
43	3	3	3		Layanan deteksi dini terdugas TBC Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	28 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
44	3	3	3		Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS tingkat Provinsi	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	12 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
45	3	3	3		Deteksi dini penyakit HIV AIDS dan IMS di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	13 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
46	3	3	3		Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit kusta di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	4 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
47	3	3	3		Surveilans dan deteksi dini penyakit kusta di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	99 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
48	3	3	3		Pendidikan dan pelatihan pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan frambusia di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	4.380 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
49	3	3	5	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat kesehatan Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asmat 2. Biak Numfor 3. Boven Digoel 4. Deiyai 5. Dogiyai 6. Intan Jaya 7. Jayapura 8. Jayawijaya 9. Kepulauan Yapen 10. Lanny Jaya 11. Mamberamo Raya 12. Mamberamo Tengah 13. Mappi 14. Merauke 15. Mimika 16. Nabire 17. Nduga 18. Paniai 19. Pegunungan Bintang 20. Puncak 21. Puncak Jaya 22. Sarmi 23. Supiori 24. Tolikara 25. Waropen 26. Yahukimo 27. Kota Jayapura 28. Fakfak 29. Kaimana 30. Manokwari 	140 Puskesmas	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						31. Manokwari Selatan 32. Maybrat 33. Pegunungan Arfak 34. Raja Ampat 35. Sorong 36. Sorong Selatan 37. Tambrauw 38. Teluk Bintuni 39. Teluk Wondama 40. Kota Sorong					
50	3	3	5		Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat kesehatan Rujukan	1. Fakfak (RSUD Fakfak) 2. Sorong (RSUD Sorong) 3. Manokwari (RSUD Manokwari, RSUD Prop PapBar) 4. Kaimana (RSUD Kaimana) 5. Sorong Selatan (RSUD Scholoo Keyen) 6. Raja Ampat (RSUD Raja Ampat)	65 RS	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						7. Teluk Wondama (RSUD Teluk Wondama) 8. Kota Sorong (RSUD Sele Be Solu) 9. Merauke (RSUD Merauke) 10. Jayawijaya (RSUD Wamena) 11. Jayapura (RSUD Yowari, RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RSJ Abepura) 12. Nabire (RSUD Nabire) 13. Yapen (RSUD Serui) 14. Paniai (RSUD Paniai) 15. Puncak Jaya (RSUD Mulia) 16. Mimika (RSUD Mimika) 17. Boven Digoel (RSUD Boven Digoel)					

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						18. Mappi (RSUD Mappi) 19. Asmat (RSUD Asmat) 20. Yahukimo (RSUD Dekai) 21. Pegunungan Bintang (RSUD Oksibil) 22. Sarmi (RSUD Sarmi) 23. Keerom (RSUD Kwaingga) 24. Biak Numfor (RSU Biak) 25. Lanny Jaya (RSUD Tiom)					
51	3	3	5		Pengembangan jaringan <i>telemedicine</i> di Rumah Sakit dan Puskesmas	1. Keerom (RSUD Kerom) 2. Mamberamo Raya (RSUD Kawera) 3. Tolikara (RS Pratama Karubaga) 4. Manokwari (RS Pratama Warmare) 5. Kaimana (Puskesmas Waho,	4 RS dan 45 Puskesmas	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						Puskesmas Kambala) 6. Manokwari (Puskesmas Prafi, Puskesmas Masni, Puskesmas Sidey) 7. Manokwari Selatan (Puskesmas Ransiki) 8. Maybrat (Puskesmas Ayamaru, Puskesmas Aifat) 9. Pegunungan Arfak (Puskesmas Anggi) 10. Sorong Selatan (Puskesmas Teminabuan, Puskesmas Moswaren) 11. Teluk Bintuni (Puskesmas Babo, Puskesmas Aranday)					

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						12. Sorong (Puskesmas Klamono, Puskesmas Mayamuk, Puskesmas Makbon) 13. Fakfak (Puskesmas Karas, Puskesmas Bomberai) 14. Teluk Wondama (Puskesmas Wasior) 15. Raja Ampat (Puskesmas Waisai) 16. Nabire (Puskesmas Wanggarsari, Puskesmas SP1) 17. Biak Numfor (Puskesmas Ampobukor, Puskesmas Yomdori) 18. Mamberamo Tengah (Puskesmas Ilugwa)					

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						19. Mappi (Puskesmas Kota I, Puskesmas Eci, Puskesmas Bade, Puskesmas Mur, Puskesmas Sahapikiya) 20. Boven Digoel (Puskesmas Ninanti) 21. Mimika (Puskesmas Potowaibiru, Puskesmas Kokonao, Puskesmas Agimuga) 22. Yapen (Puskesmas Menawi, Puskesmas Mumbeai, Puskesmas Kosiwo) 23. Sarmi (Puskesmas Bonggo, Puskesmas Bonggo Timur, Puskesmas					

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						Betaf, Puskesmas Burtin, Puskesmas Sarmi) 24. Jayapura (Puskesmas Demta, Puskesmas Unurumguay, Puskesmas Sawoy)					
52	3	3	5		Pelayanan telemedicine di Papua	Lokus tahun 2021 adalah 3 fasyankes	18 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
53	3	3	5		Pelayanan telemedicine di Papua Barat	Lokus tahun 2022 menunggu usulan dari Dinas Kesehatan Provinsi	11 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
54	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	Sorong Selatan	1 Desa	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
55	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	Maybrat	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
56	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	Sarmi	1 Desa	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
57	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	Waropen	1 Desa	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
58	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	Nabire	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
59	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	Biak Numfor	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
60	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	Boven Digoel	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
61	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	Mappi	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
62	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	Tambrau	1 Desa	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
63	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	Pegunungan Arfak	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
64	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	Fakfak	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
65	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	Manokwari Selatan	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
66	3	3	5		Lembaga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dalam memenuhi persyaratan survei akreditasi	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
67	3	3	5		Sosialisasi Mutu dan Akreditasi Pelayanan	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Kesehatan Lainnya						
68	3	3	5		Dukungan Akreditasi Puskesmas	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
69	3	3	5		Dukungan Akreditasi Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puncak Jaya (RSUD Mulia) 2. Waropen (RSUD Rumah Rodo Fabo) 3. Nduga (RS Pratama Elvrida Sara) 4. Mamberamo Tengah (RSUD Lukas Enembe, Mamberamo Tengah) 5. Intan Jaya (RSUD Intan Jaya) 6. Deiyai (RSUD Pratama Waghete) 7. Manokwari (RS Pratama Warmare, RSUD Provinsi Papua Barat) 	9 RS	2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
70	3	3	5		Pengembangan Griya Sehat	Kota Jayapura	1 Kab/Kota	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
71	3	3	5		Pengembangan Griya Sehat	Papua Barat	1 Kab/Kota	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
72	3	3	5		Pembinaan dan Pengawasan Penyehat Tradisional	Provinsi Papua	25 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
73	3	3	5		Pembinaan dan Pengawasan Penyehat Tradisional	Provinsi Papua Barat	17 Lembaga	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
74	3	3	5		Pembangunan RS Pratama	1. Pegunungan Arfak (2020) 2. Pegunungan Bintang (2020) 3. Puncak (2017) 4. Mimika (2022)	1 RS	2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
75	3	3	5		Pembangunan RS Vertikal Papua	Jayapura	1 RS	2021-2022	Pinjaman Luar Negeri	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
76	3	3	5		Fasilitasi dan Pembinaan Daerah pada Penguatan PSC 119	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
77	3	3	5		Workshop Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Integrasi di Rumah sakit	Provinsi Papua	40 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
78	3	3	5		Workshop Penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Provinsi Papua Barat	40 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					tradisional Integrasi di Rumah sakit						
79	3	3	5		Workshop Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional Empiris	Provinsi Papua	30 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
80	3	3	5		Workshop Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional Empiris	Provinsi Papua Barat	30 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
81	3	3	5		Fasilitasi dan Pembinaan Daerah pada Pengampunan rencana operasional RS Rujukan Nasional ke RS rujukan Provinsi dan RS Regional	Provinsi Papua	1 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
82	3	3	5		Pertemuan koordinasi pengembangan Fasilitas di RSUD Perbatasan	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
83	3	3	5		Fasilitasi dan Pembinaan Daerah pada Penyelenggaraan	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Pelayanan SISRUITE						
84	3	3	5		Fasilitasi dan Pembinaan Daerah Standar RS Pendidikan	Provinsi Papua Barat	1 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
85	3	3	5		Fasilitasi dan Pembinaan Daerah pada Penyelenggaraan Pelayanan Kanker	Provinsi Papua	1 Provinsi	2022	Dekonsentrasi	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
86	3	3	5		Layanan Kesehatan dalam mendukung PON XX tahun 2021	Provinsi Papua	1 Layanan	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
87	3	3	5		Pelatihan Manajemen Puskesmas	Provinsi Papua dan Papua Barat	192 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
88	3	3	5	Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boven Digoel (RSUD Boven Digoel) 2. Kaimana (RSUD Kaimana) 3. Jayapura (RSUD Yowari Sentani) 4. Nabire (RSUD Nabire) 5. Waropen (RSUD Rumah Rodo Fabo) 6. Paniai (RSUD Paniai) 	80 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
89	3	3	5		Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (DS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat	Provinsi Papua dan Papua Barat	135 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
90	3	3	5		Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Provinsi Papua dan Papua Barat	470 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
91	3	3	5		Pelatihan Pelayanan Akupresur bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas	Provinsi Papua	25 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
92	3	3	5		Pelatihan Pelayanan Akupresur bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas	Provinsi Papua Barat	25 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
93	3	3	5		Pelatihan Uji Kompetensi Jabatan fungsional kesehatan	Provinsi Papua dan Papua Barat	60 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
94	3	3	5		Pelatihan Surveilans Kesehatan Berbasis Epid Bagi	Provinsi Papua dan Papua Barat	120 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Petugas Puskesmas						
95	3	3	5		Pelatihan Promkes bagi Petugas Puskesmas	Provinsi Papua dan Papua Barat	60 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
96	3	3	5		Pelatihan TGC di Puskesmas	Provinsi Papua dan Papua Barat	600 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
97	3	3	5		Pelatihan STBM Stunting	Provinsi Papua dan Papua Barat	60 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
98	3	3	5		Pelatihan Pelayanan Terpadu PTM	Provinsi Papua dan Papua Barat	60 Orang	2021	APBN (Dekon)	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
99	3	3	5		Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak	Provinsi Papua dan Papua Barat	30 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
100	3	3	5		Pelatihan vaksinator	Provinsi Papua dan Papua Barat	3.180 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
101	3	3	4	Penguatan Promosi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	1. Jayapura 2. Waropen 3. Sorong 4. Teluk Wondama	8 Kelompok Masyarakat	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
102	3	3	4		Promosi Peningkatan Literasi Germas melalui berbagai media	1. Jayapura 2. Waropen 3. Sorong 4. Teluk Wondama	8 Promosi	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
103	3	3	4	Pengembangan Lingkungan Sehat	Koordinasi Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) (Pengawasan	1. Jayapura 2. Mimika 3. Kota Jayapura 4. Merauke	4 Kegiatan	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Sanitasi Pangan Siap Saji pada PON 2021)						
104	3	3	4		Alat Higiene Sanitasi Pangan Dalam Rangka PON (Dukungan Pengawasan Kualitas Kesling pada PON 2021)	1. Jayapura 2. Mimika 3. Kota Jayapura 4. Merauke	4 Unit	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
105	3	3	4		Kab/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	29 Kab/Kota Provinsi Papua dan 1 Kab/Kota Provinsi Papua Barat	30 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
106	3	3	4		Kab/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	29 Kab/Kota Provinsi Papua dan 1 Kab/Kota Provinsi Papua Barat	30 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
107	3	3	4		Kab/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STEM)	10 Kab/Kota Provinsi Papua dan 13 Kab/Kota Provinsi Papua Barat	23 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
108	3	3	4		Kab/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	2 Kab/Kota Provinsi Papua dan 13 Kab/Kota Provinsi Papua Barat	15 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
109	3	3	4		Kab/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Sarana Air Minum (SAM)	5 Kab/Kota Provinsi Papua dan 13 Kab/Kota Provinsi Papua Barat)	18 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
110	6	1	2		Kab/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di fasilitas pelayanan kesehatan	15 Kab/Kota Provinsi Papua dan 13 Kab/Kota Provinsi Papua Barat)	28 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
111	3	3	4		Kab/Kota yang difasilitasi pengelolaan intervensi Kesling dalam penanggulangan TB	10 Kab/Kota Provinsi Papua dan 4 Kab/Kota Provinsi Papua Barat)	14 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
112	3	2	2	Penyelenggara an bantuan dan subsidi tepat sasaran	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	722.610 Keluarga Penerima Manfaat	2021-2022	APBN	Kementerian Sosial	Kemiskinan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
113	3	2	3	Pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif	Penyelenggaraan program sembako/KPM yang memperoleh bantuan sosial program sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	162.356 Keluarga Penerima Manfaat	2021-2022	APBN	Kementerian Sosial	Kemiskinan
114	3	2	3		Penyelenggaraan bantuan sosial program keluarga harapan/keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	963.360 Keluarga Penerima Manfaat	2021-2022	APBN	Kementerian Sosial	Kemiskinan
115	3	2	3		Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh pemberdayaan	1. Jayapura 2. Keerom 3. Teluk Wondama 4. Tambrauw	521 Keluarga Penerima Manfaat	2021-2022	APBN	Kementerian Sosial	Kemiskinan
116	3	2	3		Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan akreditasi	Nasional 34 Provinsi	8.000 Keluarga Penerima Manfaat	2021-2022	APBN	Kementerian Sosial	Kemiskinan
117	6	2	1	Penguatan Penanganan Darurat Bencana	Korban Bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Nasional 34 Provinsi	279.000 Keluarga Penerima Manfaat	2021-2022	APBN	Kementerian Sosial	Kemiskinan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					dan layanan psikososial						
118	3	5	2	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Perempuan Potensial di Pedesaan yang dilatih tentang Kepemimpinan	Provinsi Papua	60 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's
119	3	5	2		Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Peningkatan Kapasitas PUG/PPRG Penurunan Stunting	Provinsi Papua	1 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's
120	3	5	2		Standarisasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Provinsi Papua Barat	1 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's
121	3	5	2		Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PUG di bidang Ekonomi	Provinsi Papua Barat	1 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
122	3	5	2		Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam KG, PHP dan PA	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's
123	3	5	1		Daerah yang difasilitasi Bimtek Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan untuk SDM Unit Layanan	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's
124					Daerah yang difasilitasi Bimtek Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO untuk SDM Unit Layanan	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's
125	3	4	2	Sarana Prasarana Pendidikan	Operasionalisasi Asrama Mahasiswa Nusantara	1. Kota Malang 2. Yogyakarta 3. Makassar 4. Minahasa 5. Jakarta	Rancangan Perpres Asrama Mahasiswa Nusantara	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
							Sosialisasi Perpres Asrama Mahasiswa Nusantara	2022			

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
126	3	4	2		Pembangunan Unit Sekolah Baru berpola asrama	SMA Unggulan Kasuari Manokwari (Distrik Manokwari Selatan)	1 unit	2021-2022	APBN, APBD, DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
127	3	4	2		Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri	1. MAN IC Sorong 2. MAN Keerom	2 paket	2021	SBSN	Kementerian Agama	Pendidikan
128	3	4	2		Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri	1. MIN Keerom 2. MIN 1 Merauke 3. MIN Fak Fak 4. MIN Yamueti Kokoda Sorong Selatan 5. MIN Aimas Kab. Sorong	5 paket	2021	SBSN	Kementerian Agama	Pendidikan
129	3	4	2		Pengembangan Mutu Sarana Prasarana	1. MTsN Merauke 2. MTsN Kab. Sorong	3 paket	2021	SBSN	Kementerian Agama	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Madrasah Tsanawiyah Negeri	3. MTsN Fak Fak					
130	3	4	2		Pembinaan SD SMP Satu Atap	Provinsi Papua dan Papua Barat	900 lembaga	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
131	3	4	2		Revitalisasi SD-SMP berpola asrama	SD SMP YBBCK Papua Cerdas Pegunungan Bintang	Sarana prasarana ruang kelas sekolah berpola asrama dan penunjang	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
132	3	4	2		Revitalisasi SD berpola asrama	SD Inpres Malagai Lanny Jaya	Sarana prasarana ruang kelas sekolah berpola asrama dan penunjang	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
133	3	4	2		Revitalisasi SD-SMP-SMA berpola asrama	SD, SMP, SMA Terpadu Mee Pago Paniai	Sarana prasarana ruang kelas sekolah berpola asrama dan penunjang	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
134	3	4	2		Revitalisasi SMP berpola asrama	1. SMP N Krounjendit Mindiptana Boven Digoel 2. SMP N Airu Jayapura	Sarana prasarana ruang kelas sekolah berpola asrama dan penunjang	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;	Infrastruktur

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
										Pemerintah Daerah	
135	3	4	2		Revitalisasi SMK berpola asrama	1. SMK Folley Misool Raja Ampat 2. SMK Nambioman Bapai Mappi 3. SMK N 1 Sota Merauke	Sarana prasarana ruang kelas sekolah berpola asrama dan penunjang	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
136	3	4	2		Revitalisasi SMA berpola asrama	1. SMA Negeri 3 Kota Jayapura 2. SMA N 1 Ilaga Puncak 3. SMA Negeri Marau Kepulauan Yapen	Sarana prasarana ruang kelas sekolah berpola asrama dan penunjang	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
137	3	4	2	Bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2.895 orang	2021	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
							2.895 orang	2022	APBN, APBD		
138	3	4	2		Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	4.234 orang	2021	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
							5.851 orang	2022	APBN, APBD		
139	3	4	2		Beasiswa KIP Kuliah	Provinsi Papua dan Papua Barat	21.467 orang	2021	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan,	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P			28.019 orang	2022	APBN, APBD	Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	
140	3	4	2		Beasiswa LPDP	Provinsi Papua dan Papua Barat	-	2021-2022	APBN	Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah	Pendidikan
141	3	4	3	Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan	Pengangkatan Guru Honorer Sebagai Guru Tetap (P3K)	Provinsi Papua dan Papua Barat	Papua: 4669 orang; Papua Barat: 2.750 orang	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
							4.536 orang	2022			
142	3	4	3	Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	Guru yang mengikuti pembinaan sertifikasi	Provinsi Papua dan Papua Barat	727 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
143	3	4	1	Penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	Model kurikulum yang dikembangkan	1. Sarmi 2. Jayapura 3. Kota Jayapura 4. Kerom 5. Merauke	Model kurikulum masyarakat adat	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
144	3	4	3	Usulan : Optimalisasi Relawan Pendidikan	Optimalisasi Relawan Pendidikan (Kampus Mengajar)	Provinsi Papua dan Papua Barat	Kampus Mengajar 128 orang; PHP2D: 4 ormawa	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
145	3	7	1	Peningkatan kualitas pendidik vokasi	Guru Kejuruan dan instruktur kursus /yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Provinsi Papua dan Papua Barat	31 orang	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
							25 orang	2022			
146	3	7	1	Peningkatan peran dan kerjasama industri dalam pendidikan vokasi	Pengembangan SMK Mendukung Industri Pertanian, Pariwisata, dan Kesehatan	Lanny Jaya	2 sekolah	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
147	3	7	1	Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK	Provinsi Papua dan Papua Barat	43 ruang	2021	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; ; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
							25 ruang	2022			
148	3	7	1		SMK yang Mengembangkan <i>Teaching Factory</i>	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 Sekolah	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
149	3	7	2	Gedung Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Universitas Negeri Papua	Manokwari	1 ruang perpustakaan	2021	SBSN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,	Infrastruktur
150	3	7	2			Kota Jayapura		2021	SBSN		Infrastruktur

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Universitas Cenderawasih		1 gedung kuliah Fakultas Ilmu Keolahragaan			Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan	
							1 review KDP Rumah Sakit	2021-2022	APBN		
151	3	7	2		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Universitas Musamus	Merauke	1 KDP Auditorium	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
152	3	7	2	Penyediaan Sarana Pendidikan	Pembangunan Perguruan Tinggi Okmin	Pegunungan Bintang	1 paket	2021-2022	APBD	Pemerintah Daerah	Infrastruktur
153	3	7	2		Pembangunan Politeknik Wamena	Jayawijaya	Persiapan kajian	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
							Pelaksanaan kajian	2022			

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
154	3	7	2		Pembangunan Universitas Kamasan	Biak Numfor	Persiapan kajian	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
							Pelaksanaan kajian	2022			
155	3	7	2		Transformasi Politeknik Kesehatan Jayapura menjadi Institut Kesehatan Jayapura	Kota Jayapura	1 rekomendasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Kesehatan	Pendidikan
156	1	3	3	Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar Bagi Dosen dalam dan luar negeri	Provinsi Papua dan Papua Barat	12 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
157	3	4	3	Revitalisasi LPTK	Pengembangan Kurikulum Keguruan Kompetensi Sosial Budaya (Sekolah Pendidikan Guru) Kolese Pendidikan Guru	1. Merauke 2. Mimika 3. Nabire 4. Sorong	1 Modul	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
158	3	4	3		Revisi Spektrum Keahlian SMK (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018) dan Spektrum Keahlian SMK (Perdirjen	Pusat	1 kebijakan	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Dikdasmen Nomor 07/D.D5/KK/2018)						
159	3	7	1		Peserta Mengikuti Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIKES Jayapura 2. STIKES Papua 3. STMIK Kreatindo Manokwari 4. Univ Amal Ilmiah Yapiss Wamena 5. Univ Kristen Papua 6. Univ. Muhammadiyah Sorong 7. STIE Port Numbay, STMIK Agamua Wamena 8. STMIK 10 Nov JP 9. STKIP Kristen Wamena) 	2.136 mahasiswa	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
160	3	4	1	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Fasilitasi layanan Ruang Belajar Digital di daerah 3T (<i>Live Streaming</i> ,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intan Jaya 2. Yalimo 3. Dogiyai 4. Mamberamo Tengah 	Pemanfaatan Akun Pembelajaran secara daring di 200 sekolah	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
161	3	4	1		Video Pembelajaran, Latihan/ <i>Tryout</i> dan lainnya)	5. Lanny Jaya 6. Supiori 7. Tolikara 8. Mappi 9. Boven Digoel 10. Puncak Jaya 11. Nduga 12. Keerom 13. Tolikara 14. Yahukimo 15. Asmat 16. Pegunungan Bintang 17. Nabire 18. Jayawijaya 19. Paniai 20. Mamberamo Raya 21. Pegunungan Arfak 22. Tambrauw 23. Teluk Wondama 24. Sorong Selatan 25. Maybrat	Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran di 200 sekolah	2022			
162	3	4	4	Peningkatan budaya mutu pendidikan	Penyusunan <i>roadmap grand design</i> pengembangan pendidikan Papua	Provinsi Papua	1 dokumen	2021-2022	APBD	Pemerintah Provinsi Papua	Pendidikan
163	4	2	1	Perlindungan, pengembangan , dan	Penguatan lembaga	Sorong	7 lembaga	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,	SDGs

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
				pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah, dan kearifan lokal	kepercayaan dan adat					Riset, dan Teknologi	
164	4	2	3	Pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan	Wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	Teluk Bintuni	3 desa	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	SDGs
165	3	4	2	Penanganan Anak Tidak Sekolah	<i>Informal Learning Center:</i> Penyusunan kurikulum pendidikan nonformal berbasis kearifan lokal	1000 learning center di 42 kabupaten/kota di Papua dan Papua barat	500 <i>learning center</i>	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pendidikan
166	3	4	2		<i>Informal Learning Center:</i> Pembentukan lembaga pengelola	42 Kab/kota	22 lembaga/ organisasi	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden;	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					pusat belajar informal					Kementerian Dalam Negeri	
167	3	4	2		<i>Informal Learning Center:</i> Pembangunan pusat belajar dan sarana prasarana penunjang	42 Kab/Kota	4 gedung dan sarana prasarana penunjang	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pendidikan
168	3	4	2		<i>Informal Learning Center:</i> ToT kurikulum	42 Kab/Kota	44 pelatihan	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan
169	3	4	2		<i>Informal Learning:</i> Monitoring dan evaluasi	42 Kab/Kota	44 dokumen	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan
170	3	4	2		<i>Informal Learning Center:</i> Publikasi pameran,	42 Kab/Kota	22 pameran	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden;	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					kompetisi, webinar, podcast, produk					Kementerian Dalam Negeri	
171	3	4	2		<i>Informal Learning Center</i> : Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk	42 Kab/Kota	44 kompetisi	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan
172	3	4	2		<i>Informal Learning Center</i> : Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk	42 Kab/Kota	264 podcast	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan
173	3	4	2		<i>Informal Learning Center</i> : Penyusunan modul dan pengukuran perubahan perilaku secara <i>online</i>	42 Kab/Kota	1 modul	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan
174	3	4	2		<i>Informal Learning Center</i> : Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk.	42 Kab/Kota	22 produk	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan
175	3	5	3	Manajemen Talenta Papua	Pengembangan Talenta Muda Papua dan Penyelenggaraan	Provinsi Papua dan Papua Barat	680 peserta didik	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Kejuaraan di Tingkat Provinsi (menuju Nasional dan Internasional)					Riset, dan Teknologi	
176	3	5	3		Membangun dan mengembangkan sistem data base talenta muda Papua yang terintegrasi	Pusat	12.000 data entry	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
177	3	5	3		Penyusunan Modul Pelatihan: Nasionalisme, Kepemimpinan, pengembangan diri	Pusat	Penyusunan Kerangka Modul, FGD Modul Pelatihan, penerbitan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Modul	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
178	3	5	3		ToT Modul Pelatihan	Pusat	90 pelatih	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
179	3	5	3		Pendampingan dan pembinaan talenta muda Papua	Nasional	2.000 profil	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
180	3	5	3		Branding talenta	Nasional	288 publikasi	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
181	3	5	3		Distribusi talenta (Afirmasi Action untuk ASN, BUMN dan Perusahaan multinasional)	Nasional	1 regulasi/ Kebijakan	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
182	3	5	3		Gedung dan fasilitas penunjang serta operasional	Pusat	Diskusi lintas K/L, Pemda dan Universitas dan 11 Pusat Studi	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
183	3	5	3		Sekretariat MTP	Pusat	Gedung Sekretariat	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
184	3	5	3		Operasional sekretariat	Pusat	10 staf	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
185	3	7	3	Pemanfaatan Iptek dan penciptaan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan berkelanjutan	Hasil Penelitian untuk Pengabdian Dosen kepada Masyarakat	Provinsi Papua dan Papua Barat	12 lap	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
186	3	7	3	Perguruan Tinggi sebagai Produsen Iptek Inovasi dan Pusat Keunggulan	Teknologi dan Inovasi untuk UMKM	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 Purwarupa	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	SDGs
187	3	7	3		Desa Berinovasi	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 desa	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	SDGs
188	3	7	3	Peningkatan Kualitas Lulusan PT	<i>Start Up</i> Inovasi Masyarakat	Provinsi Papua dan Papua Barat	6 <i>Start Up</i>	2021	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional	SDGs
189	3	7	4	Penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade	Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO / Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan	Provinsi Papua dan Papua Barat	316 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					(Pembinaan Atlet Papua)						
190	3	7	4	Penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade	Talenta Olahraga Kaum Muda Papua	Provinsi Papua dan Papua Barat	orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs
191	3	7	4	Pengembangan budaya olahraga	Pemanfaatan Olahraga Eks PON XX dan PEPARNasekS XVI 2020	Provinsi Papua dan Papua Barat	100%	2021-2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs
192	3	7	4	Fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Nasional dan / atau Internasional dalam Rangka Mendukung Pemanfaatan Prasarana Olahraga PON XX dan PEPARNAS XVI 2020	Provinsi Papua dan Papua Barat	8 Paket	2021-2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs

b. Bidang Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
1	1	8	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat	Provinsi Papua dan Papua Barat	17 Unit	2022	APBN	Kementerian Perdagangan	Infrastruktur
2	1	8	3		Pelaksanaan Sekolah Pasar	Provinsi Papua dan Papua Barat	690 Orang	2022	APBN	Kementerian Perdagangan	Kemiskinan
3	2	7	4	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	Revitalisasi Gudang non-SRG	Kota Jayapura	1 Unit	2022	APBN	Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah	Infrastruktur
4	2	7	4		Bimtek dan Pengembangan Sistem Informasi Gerai Maritim	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Kegiatan	2021- 2022	APBN	Kementerian Perdagangan	Ketenagakerjaan
5	2	7	4		Penataan Perkampungan tradisional sebagai pendukung “Wisata Perbatasan”	Kota Jayapura	1 unit	2021-2022	APBN, APBD	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Pemerintah Daerah	Kemiskinan
6	2	7	4		Pembangunan <i>Home Stay</i> kampung Terapung Perbatasan	Kota Jayapura	2 Unit	2021-2022	APBN, APBD	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah	Infrastruktur

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
7	1	6	1	Pengembangan industri kimia, farmasi dan logam	Fasilitasi rencana penanaman modal proyek strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	Teluk Bintuni	1 Badan Usaha	2022	KPBU	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kemiskinan
8	1	6	1		Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	Teluk Bintuni	1 Kabupaten	2022	APBN	Kementerian Perindustrian	Kemiskinan
9	1	4	3	Peningkatan Produksi Perikanan	Bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	Provinsi Papua dan Papua Barat	12.000 kg	2021 – 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
10	1	4	3		Sarana pembenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat	Provinsi Papua dan Papua Barat	15 paket Kebun Bibit Rumput Laut Kuljar	2021 – 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
11	3	7	1	Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Puncak Jaya 2. Fakfak	2 Lokasi	2021	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
12	3	7	1		Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	Teluk Wondama	22 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketenagakerjaan
13	2	7	6	Pengembangan KEK Sorong	Fasilitasi penyelesaian masalah strategis di KEK	Sorong	1 Badan Usaha	2021-2022	APBN	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kemiskinan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
14	1	4	4	Peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan	Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	1. Merauke 2. Kota Sorong	2 Fasilitas Kawasan	2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
15	1	8	4	Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penetapan Sail Teluk Cenderawasih	Biak Numfor	1 Paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
16	1	8	4		Penerapan <i>Sustainable Tourism Practices</i> Di Destinasi <i>Branding</i> dan Prioritas	Raja Ampat	1 DPP dan destinasi <i>branding</i>	2021-2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
17	1	8	4		Dukungan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat dalam pembangunan kepariwisataan sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS);	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 Paket	2021-2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
18	1	8	4		Rencana Induk Pariwisata Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMP)	Raja Ampat	1 Dokumen	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
19	1	4	2	Pengembangan Wisata Bahari Jasa Maritim	Pengembangan pariwisata bahari Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih	Teluk Wondama	1 Paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
20	1	4	2		Perintisan Destinasi Pariwisata: ekowisata berbasis Kawasan Hutan Prioritas, taman bumi (geopark), dan wisata bahari yang berbasis Taman Wisata Perairan dan Suaka Alam Perairan	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 Paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
21	4	2	2	Pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	Penataan Kawasan Cagar Budaya Aitumieri	Teluk Wondama	1 Paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
22	4	2	2		Rehabilitasi kawasan situs budaya Gereja Tua Isna Jedi Yendi, dan Gua Tengkorak Roswar di Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih	Teluk Wondama	1 Paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Infrastruktur

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
23	1	6	3	Peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata	Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru	Provinsi Papua Barat	8 Destinasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
24	1	6	3		Pusat Informasi Pariwisata berbasis Geopark	16 Geopark dalam DPP	3 Unit	2021 - 2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
25	1	6	3		Perintisan destinasi pariwisata: wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan), wisata budaya (<i>heritage tourism</i> , wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada <i>Cultural Heritage</i> Regeneration, dan wisata kampung), dan wisata buatan (<i>meeting-incentive-convention-exhibition/MICE</i> dan wisata olahraga)	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 Paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
26	1	5	3	Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi	Pelatihan	1. Jayapura 2. Merauke 3. Sorong	1511 Orang	2021	APBN, DAK	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Pemerintah Daerah	UMKM
27	1	5	3		Koperasi yang difasilitasi sistem digitalisasi: Penerapan	1. Teluk Wondama 2. Teluk Bintuni 3. Sorong Selatan 4. Tambrauw 5. Intan Jaya	10 Koperasi	2022	APBN	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	UMKM

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Manajemen Koperasi Modern	6. Puncak Jaya 7. Asmat 8. Pegunungan Bintang 9. Tolikara 10. Keerom 11. Waropen 12. Supiori 13. Memberamo Raya 14. Nduga 15. Lanny Jaya 16. Mamberamo Tengah 17. Dogiyai 18. Yalimo 19. Puncak 20. Deiyai 21. Mappi					
28	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Provinsi Papua	720 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
29	2	7	4		Pembangunan amenitas wisata di daerah tertinggal (Pembangunan <i>Amphitheater</i>)	Jayawijaya	1 Paket	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,	Kemiskinan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
										dan Transmigrasi	
30	2	7	4		Pengembangan amenitas wisata di daerah tertinggal (Pembangunan <i>Homestay</i>)	1. Teluk Wondama 2. Jayawijaya 3. Tambrau	3 Paket	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
31	2	7	9		Bantuan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama	1. Merauke 2. Raja Ampat	1 Paket	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Infrastruktur
32	2	7	4		Pengadaan sarana pasca panen	1. Keerom	1 Paket	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
33	2	7	4		Pengadaan dan penyaluran catupangan (beras, angkutan beras, non beras)	Provinsi Papua dan Papua Barat	60 Kepala Keluarga	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
34	2	7	4		Pengembangan potensi SDA pertanian	Nabire	1 Paket	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
35	2	7	4		Stimulan pengembangan budaya berbasis ekonomi kreatif	Sorong	1 Kabupaten	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
36	2	7	4		Jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan di daerah tertinggal (Pro p Pembangunan Desa Terpadu)	Jayawijaya	2,24 km	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Infrastruktur
37	2	7	4		Fasilitasi Pengembangan dan Pemasaran BUM Desa Bersama (pro p Pembangunan Desa Terpadu)	1. Kota Jayapura 2. Manokwari	2 BUM Desa	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kemiskinan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
38	2	7	4		Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prokades di Daerah Tertinggal	1. Sorong 2. Nabire	2 Unit	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kemiskinan
39	2	7	2	Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir	Hijauan Pakan Ternak	Papua Barat	5 lokasi	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
40	2	7	2		Optimalisasi Reproduksi	1. Papua 2. Papua Barat	Papua 5.000 ekor Papua Barat 4.500 ekor	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
41	2	7	2		Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	1. Manokwari 2. Teluk Bintuni 3. Teluk Wondama	Manokwari 30 unit; Teluk Bintuni 5 unit; Teluk Wondama 1 unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
42	2	7	2		Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	1. Teluk Wondama 2. Teluk Bintuni 3. Sorong Selatan 4. Sorong 5. Raja Ampat 6. Merauke 7. Jayapura 8. Kep. Yapen	Teluk Wondama 2 unit; Teluk Bintuni 2 unit; Sorong Selatan 2 unit; Sorong 2 unit; Merauke 4	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						9. Biak Numfor 10. Mappi 11. Mimika	unit, Jayapura 4 unit, Kepulauan Yapen 1 unit, Biak Numfor 3 unit, Raja Ampat 3 unit, Mappi 4 unit, Mimika 7 unit				
43	2	7	2		Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	1. Sorong 2. Manokwari Selatan 3. Jayawijaya	Sorong 2 unit; Manokwari Selatan 2 unit; Jayawijaya 2 unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
44	2	7	2		Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	Manokwari	10 unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
45	2	7	2		UKM yang ditingkatkan Kompetensinya melalui penguatan Kapasitas yang terstandar: Pelatihan Vocational	1. Kota Jayapura 2. Kota Sorong 3. Manokwari	120 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	UMKM

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
46	2	7	2		Pembangunan Gudang Unit	Teluk Wondama	1 Unit	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Infrastruktur
47	2	7	2		Revitalisasi Sentra IKM melalui DAK Fisik Sentra IKM	1. Sorong 2. Sorong Selatan 3. Teluk Bintuni 4. Jayapura 5. Sarmi 6. Biak Numfor 7. Tolikara 8. Nabire 9. Intan Jaya 10. Paniai	8 IKM	2021-2022	APBN	Kementerian Perindustrian	Kemiskinan
48	2	7	2		Prasarana yang dibangun di SKPT Biak	Biak Numfor	3 prasarana	2021	Hibah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
49	2	7	2		Database Program Petani Millenial	Provinsi Papua dan Papua Barat	20.000 Dokumen	2021-2022	APBN	Kantor Staf Presiden	Kemiskinan
50	2	7	3	Pembangunan Kota Baru Sorong	Pusat Pengembangan Keahlian/ <i>Skill Development Center</i> (Fungsi Pendidikan)	Kota Sorong	1 Pusat Pengembangan Keahlian	2021-2022	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
51	1	4	5	Peningkatan SDM kelautan dan perikanan	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	Teluk Wondama	185 Kelompok	2021-2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
52	1	4	5		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	Provinsi Papua (14 Kelompok) dan Papua Barat (38 Kelompok)	52 Kelompok	2021-2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan

c. Bidang Infrastruktur Dasar dan Ekonomi

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P								
1	5	1	2	Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Provinsi Papua dan Papua Barat	120.478 SR	2021-2022	APBN, APBD, DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur	
2	5	1	2		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Provinsi Papua dan Papua Barat	30 unit	2021-2022	APBN, APBD, DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur	
3	5	1	2		Sistem pengelolaan air limbah domestik Setempat Skala Individu	Provinsi Papua dan Papua Barat	12.000 unit	2021-2022	APBN, APBD, DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur	
4	5	1	2		Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
5	5	1	2		Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
6	5	1	2		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat	Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
7	5	1	1	Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	Pembangunan Rumah Khusus	Provinsi Papua dan Papua Barat	573 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
						Provinsi Papua dan Papua Barat	372 unit	2021-2022	DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
8	5	1	1		Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	Jayapura	215 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
9	5	1	1		Rumah Swadaya Afirmasi – Pembangunan Baru	1. Jayawijaya 2. Puncak Jaya 3. Asmat 4. Boven Digoel 5. Keerom 6. Nduga 7. Puncak 8. Intan Jaya	873 unit	2021	DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						9. Deiyai 10. Sorong 11. Manokwari Selatan					
10	5	1	1	Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Provinsi Papua dan Papua Barat	10.080 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
11	5	1	1		Rumah Swadaya Afirmasi – Peningkatan Kualitas	1. Jayapura 2. Biak 3. Kepulauan Yapen 4. Merauke 5. Jayawijaya 6. Paniai 7. Nabire 8. Puncak Jaya 9. Mappi 10. Tolikara 11. Pegunungan Bintang 12. Mamberamo Raya 13. Waropen 14. Yahukimo 15. Supiori 16. Mamberamo Tengah 17. Lanny Jaya	1.762 unit	2021	DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						18. Yalimo 19. Deiyai 20. Kota Jayapura 21. Manokwari 22. Fakfak 23. Teluk Bintuni 24. Teluk Wondama 25. Kaimana 26. Maybrat 27. Pegunungan Arfak 28. Kota Sorong					
12	5	1	1		Rumah Swadaya Kumuh – Peningkatan Kualitas	Kota Jayapura	90 unit	2021	DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
						Manokwari	15 unit	2021	DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
13	3	4	2	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Penyusunan DED Asrama Mahasiswa Nusantara	1. Kota Surabaya 2. Kota Malang 3. Kota Makassar	6 lokasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						4. Provinsi DKI Jakarta 5. Minahasa 6. Bantul					
14	3	4	2		Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara	1. Kota Surabaya 2. Kota Malang 3. Kota Makassar 4. Provinsi DKI Jakarta 5. Minahasa 6. Bantul	6 lokasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
16	3	4	2		Pembangunan dan rehabilitasi gedung fungsi sosial dan keagamaan/Papua Youth Creative Hub	Kota Jayapura	1 Bangunan Papua Youth Creative Hub	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
17	-	-	-	-	Pembangunan Istana Kepresidenan	Kota Jayapura	Pembebasan Lahan, FS dan DED	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
18	5	1	1	Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh	Penataan Kawasan Samubaah	Maybrat	1 Kawasan	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab Pemerintah Daerah	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
28	5	1	1		Penataan Kawasan Mendukung PON Papua	Kampung Harapan	32 Hektar	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
29	5	1	1		Penataan Kawasan Kantor Bupati dan Kawasan Alun-Alun Tahap 1	Tambrau	1 Kawasan	2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
30	5	1	1		Pemugaran Permukiman Kumuh	Provinsi Papua	29 Ha	2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
31	7	5	1	Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu	PLBN Yatetkun, Boven Digoel	1 Kawasan	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
34	5	1	5	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur	Pengendalian banjir Kota Merauke yang dibangun	Provinsi Papua	1,7 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
				ketahanan bencana						Pemerintah Daerah	
35	5	1	5		Pengendalian banjir Sungai Brazza yang dibangun	Provinsi Papua	0,15 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
36	5	1	5		Pengendalian banjir Sungai Klafma yang dibangun	Provinsi Papua Barat	0,45 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
37	5	1	5		Pengendalian banjir Sungai Remu yang dibangun	Provinsi Papua Barat	1,4 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
38	5	1	5		Pengendalian banjir Sungai Tubhi yang dibangun	Provinsi Papua Barat	0,18 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
39	5	1	5		Pengendalian banjir Sungai Wariori yang dibangun	Provinsi Papua Barat	0,4 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
40	5	1	5		Pengendalian banjir sungai	Asmat	0,37 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
										dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	
41	5	1	5		Pengendalian banjir Kali Yetni	Yahukimo	4,3 km	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
42	5	1	3	Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	Danau Sentani yang direvitalisasi	Provinsi Papua	1 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
43	5	1	3		Danau Ayamaru yang direvitalisasi	Provinsi Papua Barat	1 danau	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
44	5	1	3		Rehabilitasi dan Peningkatan Air Baku	Kota Bintuni, Teluk Bintuni	15 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
45	5	1	3			Nabire	1,4 km	2021			
46	5	1	3		Pembangunan Air Baku	SA Sungai Wasi Wamena Jayawijaya Tahap I	1 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
47	5	1	3		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Yahukimo	5 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
48	5	1	3		Rehabilitasi Sumur Air Tanah	Keerom	3 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
49	5	1	3		Pembangunan Tampung Air Hujan Pada Daerah Kekeringan	Kampung Biha Distrik Makimi Nabire	1 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
50	5	1	3		Pembangunan Tampung Air Hujan Pada Daerah Kekeringan	Kampung Nifasi Distrik Makimi Nabire	1 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
51	5	1	3		Pembangunan Tampung Air Hujan Pada Daerah Kekeringan	Arso V Distrik Arso Keerom	1 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
52	5	1	3		Pembangunan Tampung Air Hujan Pada Daerah	Arso VI Distrik Arso Keerom	1 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Kekeringan					Pemerintah Daerah	
53	5	1	3		Pembangunan Tampung Air Hujan Pada Daerah Kekeringan	Asmat	4 unit	2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
54	5	1	3		Embung Giwu yang Dibangun	Klalele, Giwu Kota Sorong	1 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
55	5	1	3		Pembangunan Waduk Warsamson	Provinsi Papua Barat	1 waduk	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
56	5	1	6	Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	Pembangunan Bendungan	Bendung Wanggar DI Wanggar 3200 Ha Nabire Tahap III	1 bendung	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
57	5	1	6	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Daerah irigasi Bomberay yang dibangun	Provinsi Papua Barat	1 DI	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
58	5	1	6		Pembangunan Saluran Primer, Sekunder dan Tersier	DI Kalibumi Kiri Nabire	2,4 km	2021	APBN	Pemerintah Daerah	

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
59	5	4	3	Peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Gasifikasi pembangkit tenaga listrik/konversi pembangkit listrik BBM menjadi Gas	<ol style="list-style-type: none"> 1. PLTMG Manokwari 2 2. PLTMG Biak 3. PLTG/MG Biak 2 4. PLTG/MG Nabire 2 5. MPP Jayapura 6. PLTMG Jayapura Peaker 7. PLTG/MG Merauke 2 8. PLTMG Merauke 9. MPP Timika 10. PLTMG Serui 11. MPP Manokwari 12. MPP Fakfak 13. PLTMG Kaimana 14. PLTG/MG/GU Sorong 2 15. PLTMG Manokwari 3 16. PLTMG Jayapura 	18 Pembangkit	2021-2022	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. Pertamina Persero	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						17. PLTMG Timika 2 (30 MW) 18. PLTMG Timika 2 (10 MW)					
85	5	4	2	Perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20kV	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	218,12 kms	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
86	5	4	2		Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 220 V	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	113,9 kms	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
87	5	4	2		Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL)	Provinsi Papua dan Papua Barat	478 unit	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
							58 desa	2022			
88	5	4	2	Alat Penyimpan Daya Listrik (APDAL)	Provinsi Papua dan Papua Barat	12.586 unit	2022	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Infrastruktur	
89	5	4	1	Perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan	PLTS Rooftop	Provinsi Papua dan Papua Barat	9 unit	2022	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Infrastruktur
90	5	4	1		Isolated/ Komunal/ Hybrid	Provinsi Papua dan Papua Barat	7.200 KW/KWp PLTS; 1.170 KW/KWp PLTD Hybrid	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN Persero	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P			4.140,39 KW/KWp	2022			
91	5	4	2	Perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga	1. Maybrat 2. Boven Digoel 3. Waropen 4. Mamberamo Raya 5. Merauke	7 Titik Penyalur	2021	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. Pertamina Persero	Infrastruktur
						1. Raja Ampat 2. Puncak 3. Nduga 4. Keerom 5. Asmat 6. Jayawijaya 7. Pegunungan Arfak 8. Maybrat 9. Tambrauw 10. Sorong Selatan 11. Paniai 12. Puncak Jaya	16 Titik Penyalur	2022			
92	5	5	1	Pengembangan infrastruktur pitalebar	Palapa Ring	Provinsi Papua dan Papua Barat	30% pemanfaatan kapasitas Palapa Ring dengan rata-rata SLA 95%	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur
93	5	5	1		BTS/Lastmile	Provinsi Papua dan Papua Barat	452 unit eksisting, 5.204 unit baru	2021-2022	APBN, USO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
94	5	5	1		Akses Internet	Provinsi Papua dan Papua Barat	1.236 unit eksisting, 6.229 unit baru	2021-2022	APBN, USO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur
95	7	1	3	Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	Komunikasi Publik/Diseminasi Informasi melalui Media Kominfo (GPR TV)	Provinsi Papua dan Papua Barat	12 Jangkauan	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SDGs
96	7	1	3		Komunikasi Publik/Diseminasi Informasi mengenai Stunting	Provinsi Papua dan Papua Barat	6 Spot/Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SDGs
97	7	1	3		Diseminasi Informasi bidang Politik Hukum dan Keamanan	Provinsi Papua dan Papua Barat	15 Spot/Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SDGs
98	7	1	3		Diseminasi Informasi bidang Perekonomian dan Maritim	Provinsi Papua dan Papua Barat	14 Spot/Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SDGs
99	7	1	3		Diseminasi Informasi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Provinsi Papua dan Papua Barat	15 Spot/Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SDGs
100	7	1	3		Diseminasi informasi di wilayah 3T	Provinsi Papua dan Papua Barat	17 Spot/Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					melalui mitra strategis						
101	5	2	4	Jembatan udara	Pengembangan Bandara Elelim	Yalimo	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
102	5	2	4		Pemngembangan Bandara Wamena	Jayawijaya	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
103	5	2	4		Pengembangan Bandara Tanah Merah	Boven Digoel	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
104	5	2	4		Pengembangan Bandara Korowai Batu	Boven Digoel	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
105	5	2	4		Pengembangan Bandara Nop Goliath	Yahukimo	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
106	5	2	4		Pengembangan Bandara Korupun	Yahukimo	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
107	5	2	4		Pengembangan Bandara Mozes Kilangin	Mimika	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
108	5	2	4		Pengembangan Bandara Oksibil	Pegunungan Bintang	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
109	5	2	4		Pengembangan Bandara Ilaga	Puncak	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
110	5	2	4		Pengembangan Bandara Mulia	Puncak Jaya	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
111	5	2	4		Pengembangan Bandara Tiom	Lanny Jaya	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
112	5	2	4		Penyediaan Subsidi Perintis Penumpang, Kargo dan BBM	Papua	1 lokasi	2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
113	5	2	4		Pengembangan Airstrip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agandugume, Puncak 2. Sinak, Puncak 3. Kiwirok, Pegunungan Bintang 4. Aboy, Pegunungan Bintang 5. Teraplu, Pegunungan Bintang 6. Korupun, Yahukimo 7. Sobaham, Yahukimo 8. Aboge/Eci, Mappi 9. Senggo, Mappi 10. Manggelum, Boven Digoel 11. Anggi, Pegunungan Arfak 12. Towe Hitam, Keerom 	2021: 12 unit 2022: 1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
114	5	2	4	Pembangunan bandara baru	Pembangunan Bandara Sobaham	Yahukimo	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
115	5	2	4		Pembangunan Bandara Wasior Baru	Teluk Wondama	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
116	5	2	4		Pembangunan Bandara Siboru	Fakfak	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
117	5	2	4	Pengembangan Bandara Hub Primer; Pengembangan bandara yang mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, dan KI)	Pengembangan Bandara Babo	Teluk Bintuni	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
118	5	2	4		Pengembangan Bandara Bintuni	Teluk Bintuni	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
119	5	2	4		Pengembangan Bandara Marinda Waisai	Raja Ampat	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
120	5	2	4	Pengembangan Bandara Hub Primer	Pengembangan Bandara Kepi	Mappi	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
121	5	2	4		Pengembangan Bandara Ewer	Asmat	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
122	5	2	4		Pengembangan Bandara Mopah	Merauke	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
123	5	2	4		Pengembangan Bandara Rendani	Manokwari	1 unit	2021-2022	APBN, SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
124	5	2	4		Pembangunan Bandara Anggi	Pegunungan Arfak	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
126	2	7	3		Pembangunan kota baru di Provinsi Papua Barat	Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	Kota Sorong	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan
127	2	7	3	Pengembangan Sistem Angkutan		Kota Sorong	1 kegiatan	2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan						
128	5	2	3	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut	Pengembangan Pelabuhan Pomako	Mimika	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
129	5	2	3		Pengembangan Pelabuhan Moor	Mappi	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
130	5	2	3		Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaimana	Kaimana	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
131	5	2	3		Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui	Kepulauan Yapen	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
132	5	2	3		Pengembangan Pelabuhan Sarmi	Sarmi	1 unit	2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
133	5	2	3		Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Karas	Fakfak	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
134	5	2	3		Pengembangan pelabuhan utama (hub)	Pengembangan Pelabuhan Sorong	Kota Sorong	1 unit	2021-2022	BUMN	Kementerian Perhubungan
135	5	2	5	Pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade	Asmat	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
136	5	2	5								

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
137	5	2	5		Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Sorong	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
138	5	2	5		Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati	Raja Ampat	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
139	5	2	5		Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta	Raja Ampat	1 unit	2021-2022	APBN, SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
140	5	2	5		Pembangunan Pelabuhan Sungai Akat	Asmat	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
141	5	2	5		Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats	Asmat	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
142	5	2	5		Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer	Asmat	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
143	5	2	5		Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerma	Asmat	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
144	5	2	5		Pembangunan Pelabuhan Sungai Papera	Asmat	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
145	5	2	5	Penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk	Subsidi Operasional Angkutan Jalan Papua	Papua	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
				penumpang dan barang							
147	5	2	1	Pembangunan Jalan Strategis	Jalan Trans Papua	Papua	550,33 km	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
148	5	2	1		Jalan Trans Papua Barat	Papua Barat	172,03 km	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
149	5	2	1		Pembangunan Jembatan di Jalan Trans Papua	Papua	9.606 m	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
150	5	2	1		Pembangunan Jalan Perbatasan	Pegunungan Bintang	14,55 km	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
151	5	2	1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah	Pembangunan Jalan Trans Pulau Biak	Biak Numfor	27,1 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
152	2	7	4	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	Pengembangan Terminal Skouw	Kota Jayapura	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
153	5	1	4	Pembinaan dan Pendidikan SDM keselamatan dan	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Provinsi Papua dan Papua Barat	82 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
154	5	1	4	keamanan transportasi, pencarian dan pertolongan	Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi Udara	Provinsi Papua dan Papua Barat	1600 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Pendidikan
155	5	1	4		Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Provinsi Papua dan Papua Barat	82 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Pendidikan
156	5	1	4		Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi Laut	Provinsi Papua dan Papua Barat	4152 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Pendidikan
157	5	1	4		Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Provinsi Papua dan Papua Barat	21 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Pendidikan

d. Bidang Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
1	6	2	1	Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana	Kajian pemetaan dan analisis risiko bencana	Raja Ampat	1 kajian risiko bencana kawasan pariwisata yang disusun	2021	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
2	6	2	1		Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang	Provinsi Papua dan Kabupaten /Kota di Provinsi Papua	15 Dokumen Materi Teknis, Dokumen Buku Rencana, Album Peta, Rancangan Peraturan Daerah, dan Naskah Akademik	2021 - 2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	SDGs
3	6	2	1		Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang	Provinsi Papua Barat dan Kabupaten /Kota di Provinsi Papua Barat	7 Dokumen Materi Teknis, Dokumen Buku Rencana, Album Peta, Rancangan Peraturan Daerah, dan Naskah Akademik	2021 - 2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	SDGs
4	6	2	1	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah	Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik sektor permukiman dan infrastruktur	Provinsi Papua	2 Pendampingan	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P								
5	6	2	1	terdampak bencana	Melaksanakan inventarisasi, verifikasi, dan pendampingan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan daerah terdampak pascabencana	1. Teluk Wondam 2. Fakfak	2 Kegiatan	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs	
6	6	2	1		Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Provinsi Papua Barat	80 orang yang didampingi dalam mengkaji kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs	
7	6	1	3	Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	Pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	1 lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	2022 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs	
8	3	6	3	(termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Penataan penguasaan dan pemilikan TORA	Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Maybrat	1674 Hektar	2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
9	3	6	3		Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Pegunungan Arfak	2.029,2 Hektar	2021	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs	

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
10	3	6	3		Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Jayawijaya	1.8277 Hektar	2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
11	6	1	1	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rawan Karhutla	Provinsi Papua	32 desa rawan karhutla yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
12	6	1	1		Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rawan Karhutla	Provinsi Papua Barat	28 desa rawan karhutla yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
13	6	1	1		Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	Provinsi Papua	32 kegiatan pemadaman darat	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
14	6	1	1		Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	Provinsi Papua Barat	28 kegiatan pemadaman darat	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
15	6	1	1		Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH	Provinsi Papua dan Papua Barat	4 unit lembaga/komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
16	6	1	1		Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Provinsi Papua dan Papua Barat	8 Unit sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	2021 – 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
17	6	1	1	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Operasional	Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Papua dan Papua Barat	5,53 juta ha kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	2021 – 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SDGs
18	1	4	2	Perlindungan wisata bahari dan jasa maritim	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	1. TWP Padaido (Papua) 2. SAP Raja Ampat 3. SAP Waigeo Sebelah Barat (Papua Barat)	1,17 luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	2021 – 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SDGs
19	1	4	2		Kawasan Konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil (nasional dan daerah) yang ditetapkan	Provinsi Papua Barat	1.610.298 ha Kawasan Konservasi baru	2021 – 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
20	6	2	1	Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana di daerah	Provinsi Papua Barat	70 SDM yang mengikuti diklat teknis dan simulasi PB di daerah	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
21	6	2	1		Budaya Sadar Bencana	1. Biak 2. Asmat 3. Mamberamo Raya 4. Dogiyai (2021) 5. Sorong 6. Jayapura (2022)	7 Kegiatan	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
22	6	2	1		Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pusdalops bidang Data, informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana	Mamberamo Raya	1 Pengadaan	2021	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
23	6	1	4	Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum	Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Provinsi Papua dan Papua Barat	4 Kasus sengketa lingkungan hidup	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
24	6	1	4		Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan	Provinsi Papua dan Papua Barat	20 kasus	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
				Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	sampai dengan P21						
25	6	1	4		PPNS LHK yang Ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	8 PPNS LHK (orang)	2021 – 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
26	6	2	1	Penguatan Penanganan Darurat Bencana	Pendamping Penanganan Korban dan Pengungsi	1. Fakfak 2. Teluk Wondam 3. Teluk Bintuni 4. Sorong 5. Manokwari Selatan 6. Kota Sorong 7. Jayapura 8. Biak Numfor 9. Mappi 10. Supiori 11. Mamberamo Raya	40 Pendamping Penanganan Korban dan Pengungsi	2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
27	6	2	1		Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	1. Kota Sorong 2. Fakfak 3. Sorong Selatan 4. Kaimana 5. Merauke	51 rancangan bangun sistem penanggulangan bencana yang disusun	2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						6. Nabire 7. Mimika 8. Kota Jayapura 9. Biak Numfor 10. Tolikara 11. Boven Digoel 12. Mamberamo Raya 13. Kepulauan Yapen 14. Sarmi 15. Jaya Wijaya 16. Keerom 17. Mappi					
28	6	2	1	Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu	Penguatan Mitigasi Objek Ketangguhan	1. Manokwari 2. Nabire 3. Mimika 4. Kota Sorong	160 Kegiatan	2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
29	6	1	4	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan,	Operasi pengamanan kawasan hutan	Provinsi Papua dan Papua Barat	16 operasi pengamanan kawasan hutan	2021 – 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
30	6	1	4	dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Operasi peredaran Hasil Hutan Ilegal	Provinsi Papua dan Papua Barat	18 operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
31	6	1	4		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Provinsi Papua dan Papua Barat	30 usaha/ kegiatan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
32	6	1	4	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PPLH yang Ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	10 PPLH (orang)	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
33	6	2	1	Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	Pemenuhan Kebutuhan Logistik Penanggulangan Bencana	Provinsi Papua Barat	1 layanan pemenuhan kebutuhan logistik Penanggulangan Bencana	2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
34	6	2	2	Perlindungan Kerentanan Pesisir dan	Penguatan kelompok kerja mangrove dan	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 kelompok kerja mangrove dan forum	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
				Sektor Kelautan	forum peduli mangrove		peduli mangrove				
35	6	2	2		Rehabilitasi hutan mangrove	Provinsi Papua dan Papua Barat	75 ha luas rehabilitasi hutan mangrove	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
36	6	3	1	Pembangunan Rendah Karbon	Komunikasi dan Sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 laporan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
37	6	3	1		Penyusunan Model Sistem Dinamik dan Skenario Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 laporan model sistem dinamik dan skenario kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
38	6	3	1		Pengenalan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan AKSARA	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 laporan data RPRKD Kab/Kota (laporan)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
39	6	3	1		Penyediaan basis data kegiatan mitigasi lingkup provinsi dan kab/kota pada Sistem AKSARA	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 dokumen basis data kegiatan mitigasi (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
40	6	3	1		Pemetaan Sektor Swasta/Non State Actor (NSA) Pendukung Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 dokumen daftar Sektor Swasta/NSA yang berpotensi mendukung Program Pembangunan Rendah Karbon (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
41	6	3	1		Penandatanganan Kesepakatan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota Percontohan dan Swasta	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Penandatanganan Kesepakatan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon (dokumen kesepakatan)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
42	6	3	1		Penyusunan laporan pelaksanaan implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 laporan pelaksanaan pilot implementasi (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
43	6	3	1		Penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 dokumen RPRKD (Dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
44	6	3	1		Penetapan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Pergub RPRKD (pergub)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
45	6	3	1		Penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 dokumen RPRKD (Dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
46	6	3	1		Penetapan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Pergub RPRKD (pergub)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
47	6	3	1		Pengenalan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan AKSARA	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 laporan data RPRKD Kab/Kota (laporan)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
48	6	3	1		Penyediaan basis data kegiatan mitigasi lingkup provinsi dan kab/kota pada Sistem AKSARA	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 dokumen basis data kegiatan mitigasi (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
49	6	3	1		Pemetaan Sektor Swasta/Non State Actor (NSA) Pendukung Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 dokumen daftar Sektor Swasta/NSA yang berpotensi mendukung Program PRK (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
50	6	3	1		Penandatanganan Kesepakatan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota Percontohan dan Swasta	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Jumlah Penandatanganan Kesepakatan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon (dokumen kesepakatan)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs

e. Bidang Tata Kelola Pemerintahan, dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
1	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu	Pendampingan Desa	Provinsi Papua dan Papua Barat	5.917 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
2	7	4	1	Manajemen Talenta Nasional ASN	Kebijakan afirmasi bidang perencanaan dan pengadaan SDM OAP pada K/L	Pusat	3 Kebijakan	2021-2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
3	7	4	1		Kebijakan afirmasi bidang perencanaan dan pengadaan SDM OAP untuk Mahasiswa dan Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan	Pusat	1 Kebijakan (Pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
4	7	4	1		Pemagangan ASN Papua di K/L	Pusat	1 Surat Menteri	2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
6	7	4	4			Kebijakan afirmasi	Pusat	1 Kebijakan	2021	APBN	Kementerian

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
				Optimalisasi SDM Unggul di BUMN	bidang perencanaan dan pengadaan SDM OAP pada K/L					BUMN	
7	7	4	4		Pendampingan Pengembangan Kinerja Bagi OAP di BUMN	Pusat	85 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian BUMN	SDGs
8	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu	Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD)	Provinsi Papua dan Papua Barat	450 Desa	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
9	2	7	4		Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui Smart Village	Provinsi Papua dan Papua Barat	1 Kebijakan (Pertahun)	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
10	2	7	4		Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	Provinsi Papua	200 Desa	2021-2022	PHLN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
11	2	7	4		Desa Digital yang dikembangkan melalui Penguatan Tata Kelola dan	Provinsi Papua dan Papua Barat	9.028 Desa (2021); 15.000 Orang (2022)	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
					Kapasitas Pendamping Desa (P3PD)					Tertinggal, dan Transmigrasi	
12	2	7	4		Desa Digital yang Dikembangkan Melalui Akademi Desa 4.0	Provinsi Papua dan Papua Barat	30.000 Orang (pertahun)	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
13	3	6	3	Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi Atas Tora	Penataan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	Provinsi Papua dan Papua Barat	28.000 Bidang	2021-2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah	SDGs
14	3	6	3		Kepastian hukum dan legalisasi Hak Atas Tanah Adat	Pusat	33 Kantor Wilayah (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah	SDGs
15	7	1	3	Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di	Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan	Pusat, Provinsi Papua dan Papua Barat	207 Spot/Kegiatan	2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika;	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
				Pusat dan daerah	Kesejahteraan Papua dan Papua Barat					Kementerian Luar Negeri	
16	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu	Dukungan Manajemen P3PD	Provinsi Papua	1 Layanan	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
17	2	7	4		Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Yang telah ditingkatkan kualitasnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	670 Orang	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
18	3	6	3	Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi Atas Tora	Kepastian Hukum dan legalisasi Hak Atas Tanah Obyek Reforma Agraria	Provinsi Papua dan Papua Barat	8.477 Bidang	2021-2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	SDGs
19	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu	Fasilitasi Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Provinsi Papua dan Papua Barat	62 Orang	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
20	2	7	4		Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	Provinsi Papua	218 Desa	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
21	7	1	1	Penguatan Demokrasi di Daerah	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	Provinsi	15 Provinsi (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
22	3	1	2	Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil Bagi Kelompok Khusus	Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di wilayah 3T	Provinsi Papua	10 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
23	7	2	3	Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia Yang Diterima	Kerjasama internasional di Kawasan Timur, Pasifik, afrika dan ASEAN untuk bidang pemerintahan, perbatasan, Politik dan Keamanan	Pusat	23 Kesepakatan	2021-2022	APBN	Kementerian Luar Negeri	SDGs
24	2	7	5	Peningkatan Peran Distrik Sebagai Role Model Pembangunan (distrik Membangun, Membangun Distrik)	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan/distrik	Provinsi Papua	71 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
25	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu	Rekomendasi Status	Provinsi Papua	1 Rekomendasi	2021	APBN	Kementerian	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
					Perkembangan Kawasan Perdesaan	dan Papua Barat	Kebijakan			Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
26	4	1	6	Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah	Provinsi	16 Provinsi (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
27	7	4	4	Meningkatkan dan memastikan transformasi pelayanan publik yang terpadu	Pendampingan Mal Pelayanan Publik di Wilayah III	Provinsi Papua dan Papua Barat	6 Lembaga (wilayah KTI)	2021-2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
28	4	1	4	Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia	Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan	Provinsi	16 Provinsi (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
				Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu							
29	2	7	5	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Angkatan pengembangan kompetensi manajemen strategi pembangunan dan inovasi daerah	Provinsi Papua dan Papua Barat	330 Orang	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
30	7	4	4	Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah III	Provinsi Papua dan Papua Barat	183 Lembaga (wilayah KTI)	2021-2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
31	7	1	2	Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	Pendidikan politik masyarakat di daerah	Provinsi	2.100 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
32	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Provinsi Papua dan Papua Barat	4 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
										Tertinggal, dan Transmigrasi	
33	7	2	3	Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia Yang Diterima	Prakarsa/Rekomendasi Indonesia Pada Forum Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Aspasaf	Pusat	25 Rekomendasi	2021-2022	APBN	Kementerian Luar Negeri	SDGs
34	2	7	5	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan	Penguatan Pranata Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial	Sorong	10 Kelompok Masyarakat	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	SDGs
35	2	7	5	Pusat-Daerah di Provinsi Papua dan	Rekomendasi Perdasi turunan UU No.21 Tahun 2001	Pusat	1 Rekomendasi Perdasi (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
36	2	7	5	Provinsi Papua Barat	Rekomendasi Perdatus turunan UU No.21 Tahun 2001	Pusat	1 Rekomendasi Perdatus (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri	
37	2	7	5		Revisi UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua	Pusat	3 Rancangan UU	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
38	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu	Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi	Provinsi Papua	27 Kabupaten (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
					Stunting					Tertinggal dan Transmigrasi	
39	7	2	3	Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia Yang Diterima	Promosi Aset Diplomasi	Pusat	112 Promosi	2021-2022	APBN	Kementerian Luar Negeri	SDGs
40	7	2	4		Rekomendasi dalam Bidang Pengamanan orang Asing /LSM dan informasi	Pusat	107 Rekomendasi	2021-2022	APBN	Kementerian Luar Negeri	SDGs
41	2	7	5	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Stimulan Penguatan Pranata Adat	Sorong	1 kabupaten	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	SDGs
42	7	4	2	Pelayanan publik berbasis elektronik (<i>e-services</i>) yang terintegrasi	Fasilitasi penerapan sistem pembangunan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kab/Kota	100 Persen	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
43	7	2	2	Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia Yang Diterima	Penguatan Kerjasama Pembangunan	Pusat	10 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Luar Negeri	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
					Internasional bidang Pertanian dan Industri, keuangan, pembangunan, pendidikan, UMKM, penanggulangan bencana, Sarana Informasi Kesehatan (Telemedicine), Perikanan						

2. Program Prioritas Tinggi

a. Program Prioritas Tinggi Bidang SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
1	3	4	2	2	Pemberian Beasiswa Afiriasi ADEM, ADIK, KIP Kuliah, dan LPDP	Beasiswa Afiriasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2.895 orang	2021	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
								2.895 orang	2022	APBN, APBD		
2	3	4	2	2		Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Provinsi Papua dan Papua Barat	4.234 orang	2021	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
								5.851 orang	2022	APBN, APBD		
3	3	4	2	2		Beasiswa KIP Kuliah	Provinsi Papua dan Papua Barat	21.467 orang	2021	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
								28.019 orang	2022	APBN, APBD		

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
4	3	4	2	2		Beasiswa LPDP	Provinsi Papua dan Papua Barat	-	2021-2022	APBN	Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
5	3	3	5	1	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penyediaan alat kesehatan Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asmat 2. Biak Numfor 3. Boven Digoel 4. Deiyai 5. Dogiyai 6. Intan Jaya 7. Jayapura 8. Jayawijaya 9. Kepulauan Yapen 10. Lanny Jaya 11. Mamberam o Raya 12. Mamberam o Tengah 13. Mappi 14. Merauke 15. Mimika 16. Nabire 17. Nduga 	40 Kab/Kota	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							18. Paniai 19. Pegunungan Bintang 20. Puncak 21. Puncak Jaya 22. Sarmi 23. Supiori 24. Tolikara 25. Waropen 26. Yahukimo 27. Jayapura 28. Fakfak 29. Kaimana 30. Manokwari 31. Manokwari Selatan 32. Maybrat 33. Pegunungan Arfak 34. Raja Ampat 35. Sorong 36. Sorong Selatan 37. Tambrau 38. Teluk Bintuni 39. Teluk Wondama 40. Kota Sorong					

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
6	3	3	5	1		Penyediaan alat kesehatan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD Fakfak 2. RSUD Kab Sorong 3. RSUD Manokwari 4. RSUD Provinsi Papua Barat 5. RSUD Kaimana 6. RSUD Scholoo Keyen 7. RSUD Raja Ampat 8. RSUD Teluk Wondama 9. RSUD Sele Be Solu 10. RSUD Merauke 11. RSUD Wamena 12. RSUD Yowari 13. RSUD Nabire 	35 RS	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							14. RSUD Serui 15. RSUD Paniai 16. RSUD Mulia 17. RSUD Kab Mimika 18. RSUD Boven Digoel 19. RSUD Mappi 20. RSUD Asmat 21. RSUD Dekai 22. RSUD Oksibil 23. RSUD Sarmi 24. RSUD Kwaingga 25. RSUD Jayapura 26. RSUD Abepura 27. RSJ Abepura 28. RSU Biak 29. RSUD Tiom					

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
7	3	3	5	1		Pembangunan RS Pratama	1. Pegunungan Arfak (2020) 2. Pegunungan Bintang (2020) 3. Puncak (2017) 4. Mimika (2022)	1 RS	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
8	3	3	5	1		Pembangunan RS Vertikal Papua	Jayapura	1 RS	2021-2022	PHLN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
9	3	3	5	1		Pelayanan kesehatan bergerak	Provinsi Papua	6 Desa	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
10	3	3	5	1		Pelayanan kesehatan bergerak	Provinsi Papua Barat	6 Desa	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
11	3	3	5	1		Lembaga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dalam memenuhi persyaratan	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
						survei akreditasi (dekon)						
12	3	3	5	1		Sosialisasi mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan lainnya (dekon)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
13	3	3	5	1		Dukungan akreditasi Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biak Numfor 2. Jayapura 3. Jayawijaya 4. Merauke 5. Mimika 6. Nabire 7. Paniai 8. Puncak Jaya 9. Kepulauan Yapen 10. Kota Jayapura 11. Sarmi 12. Keerom 13. Yahukimo 	29 Kab/Kota	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							14. Pegunungan Bintang 15. Tolikara 16. Boven Digoel 17. Mappi 18. Asmat 19. Waropen 20. Supiori 21. Mamberamo Raya 22. Mamberamo Tengah 23. Yalimo 24. Lanny Jaya 25. Nduga 26. Dogiyai 27. Puncak 28. Intan Jaya 29. Deiyai					
14	3	3	5	1		Dukungan akreditasi Puskesmas	1. Fakfak 2. Manokwari 3. Sorong 4. Kota Sorong 5. Raja Ampat 6. Sorong Selatan 7. Teluk Bintuni	13 Kab/Kota	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							8. Teluk Wondama 9. Kaimana 10. Maybrat 11. Tambrauw 12. Manokwari Selatan 13. Pegunungan Arfak					
15	3	3	5	1		Dukungan akreditasi Rumah Sakit	1. RSUD Mulia, RSUD Rumah Rodo Fabo 2. RS Pratama Elfrida Sara 3. RSUD Lukas Enembe Mamberamo Tengah 4. RSUD Intan Jaya 5. RSUD 6. Pratama Waghete	9 RS	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							7. RS Pratama Warmare 8. RSUD Provinsi Papua Barat					
16	3	3	5	1		Fasilitasi dan pembinaan daerah standar RS Pendidikan (Dekonsentrasi)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
17	3	3	5	1		Pelatihan manajemen Puskesmas	Provinsi Papua dan Papua Barat	192 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
18	3	3	1	1	Penurunan kematian ibu dan bayi	Pelayanan kesehatan reproduksi remaja	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
19	3	3	1	1		Pelayanan Antenatal Care (ANC)/pemeriksaan selama kehamilan	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua dan 13 Kab/Kota di Papua Barat)	90%	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
20	3	3	1	1		Program Rumah Tunggu persalinan	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
21	3	3	1	1		Pelayanan Persalinan Nakes	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	91%	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
22	3	3	1	1		Pelayanan Post Partum/setelah kelahiran	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	90%	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
23	3	3	1	1	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penguatan Puskesmas PONED	Lokus tahun 2021 adalah 11 puskesmas	11 Puskesmas	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
24	3	3	1	1		Penguatan RS PONEK	Lokus tahun 2021 adalah 6 RS	6 RS	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
25	3	3	1	1	Penurunan kematian ibu dan bayi	Penguatan PSC 119	1. Sorong 2. Mappi	2 Kab/Kota	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
26	3	3	2	1	Penurunan stunting	Penyediaan makanan tambahan ibu hamil KEK	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	92%	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
27	3	3	2	1		Penyediaan makanan tambahan balita kurus	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	92%	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
28	3	3	2	1		Pelaksanaan Surveilans Gizi	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	90%	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
29	9	9	8	1		Tenaga kesehatan yang dilatih Pemantauan Pertumbuhan Balita	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	250 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
30	5	5	4	1		Penyediaan Antropometri Kit	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	90%	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
31	7	7	6	1		Tenaga Kesehatan yang dilatih Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	152 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
32	8	8	7	1		Tenaga kesehatan yang dilatih Pencegahan dan Tatalaksana Balita Gizi Buruk pada Balita	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	490 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
33	3	7	2	2	Pembangunan dan Peningkatan Pendidikan Tinggi dan Vokasi Yang Berkualitas	Pembangunan Perguruan Tinggi Okmin 1. Penyiapan lahan 2. Penyediaan dokumen perencanaan 3. Pembangunan Gedung 4. Penyediaan tenaga dosen dan	Pegunungan Bintang	1 paket	2021	APBD	Pemerintah Daerah; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
						tenaga kependidikan						
34	3	4	2	1		Operasionalisasi Asrama Mahasiswa Nusantara	1. Kota Malang 2. Yogyakarta 3. Makassar 4. Minahasa 5. Jakarta	Rancangan Perpres Asrama Mahasiswa Nusantara	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
								Sosialisasi Perpres Asrama Mahasiswa Nusantara	2022			
35	3	7	2	1		Pengembangan Pusat Kajian Bertaraf Internasional (Kebudayaan) Universitas Cenderawasih	Kota Jayapura	1 paket	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
36	3	7	2	1		Pengembangan Pusat Kajian Biodiversity Bertaraf Internasional Universitas Papua	Manokwari	1 paket	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
37	3	4	2	1		Peningkatan Kualitas Sarana	Kota Jayapura	1 Gedung kuliah Fakultas	2021	SBSN	Kementerian Pendidikan,	Infrastruktur

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
						Prasarana Universitas Cenderawasih		Ilmu Keolahragaan			Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
								1 KDP Rumah Sakit	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan	Infrastruktur
38	3	4	2	1		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Universitas Musamus	Merauke	1 KDP Auditorium	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
38	3	4	2	1		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana	Manokwari	1 gedung perpustakaan	2021-2022	SBSN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan	Infrastruktur

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
						Universitas Negeri Papua					Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
39	3	4	2	1		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana ISBI Tanah Papua	Kota Jayapura	Persiapan Pembangunan Gedung perkuliahan	2021-2022	APBN, SBSN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
40	3	4	2	1		Pembangunan Universitas Kamasan	Biak Numfor	Persiapan kajian	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
								Pelaksanaan kajian	2022			
41	3	7	1	3		Guru Kejuruan dan instruktur kursus yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Provinsi Papua dan Papua Barat	56 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,	Pendidikan
42	3	7	1	3		Pengembangan SMK Mendukung Industri	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 sekolah	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
						Pertanian, Pariwisata, dan Kesehatan					Riset, dan Teknologi,	
43	3	7	1	3		SMK yang Mengembangkan Teaching Factory	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 sekolah 1 sekolah	2021 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,	Pendidikan
44	3	7	1	3		Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 sekolah	2021-2022	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
45	3	7	1	3		Start Up Inovasi Masyarakat	Provinsi Papua dan Papua Barat	6 Start Up	2021	APBN	Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional	SDGs
46	3	4	2	1	Pembangunan dan Peningkatan Sekolah Berpola Asrama	Pembangunan Unit Sekolah Baru Berpola Asrama	SMA Unggulan Kasuari Manokwari (Distrik Manokwari Selatan)	6 unit	2021-2022	APBN, APBD, DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pekerjaan	Infrastruktur

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
											Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	
47	3	4	2	1		Revitalisasi SMA Berpola Asrama	1. SMA Negeri 3 Kota Jayapura 2. SMA Negeri Kepulauan Yapen 3. SMA Negeri Ilaga Puncak	3 paket	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
53	3	4	2	1		Pembinaan SD SMP Satu Atap	Provinsi Papua dan Papua Barat	900 lembaga	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
54	3	4	1	1		Penerapan Kurikulum dan Pembelajaran Inovatif	1. Sarmi 2. Jayapura 3. Kota Jayapura 4. Kerom 5. Merauke	Model kurikulum masyarakat adat	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
55	3	4	2	1		Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri	1. MAN IC Sorong 2. MAN Keerom	3 paket	2021	SBSN	Kementerian Agama	Pendidikan
56	3	4	2	1		Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri	1. MIN Keerom 2. MIN 1 Merauke 3. MIN Fak Fak 4. MIN Yamueti Kokoda Sorong Selatan 5. MIN Aimas Sorong	5 paket	2021	SBSN	Kementerian Agama	Pendidikan

57	3	4	2	1		Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Madrasah Tsanawiyah Negeri	<ol style="list-style-type: none">1. MTsN Merauke2. MTsN Sorong3. MTsN Fakfak	3 paket	2021	SBSN	Kementerian Agama	Pendidikan
----	---	---	---	---	--	---	---	---------	------	------	-------------------	------------

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
58	3	4	2	3	Pembentukan <i>Informal Learning Center</i>	Penyusunan kurikulum pendidikan nonformal berbasis kearifan lokal	42 Kab/kota di Papua dan Papua barat	500 learning center	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
59	3	4	2	3		Pembentukan lembaga pengelola pusat belajar informal	42 kabupaten/kota	22 lembaga/ organisasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
60	3	4	2	3		Pembangunan pusat belajar dan sarana prasarana penunjang	42 Kab/Kota	4 gedung dan sarana prasarana penunjang	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
											Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	
61	3	4	2	3		ToT kurikulum	42 Kab/Kota	44 pelatihan	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
62	3	4	2	3		Monitoring dan evaluasi	42 Kab/Kota	44 dokumen	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
63	3	4	2	3		Publikasi pameran, kompetisi,	42 Kab/Kota	22 pameran	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
						webinar, podcast, produk					Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	
64	3	4	2	3		Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk	42 Kab/Kota	44 kompetisi	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
65	3	4	2	3		Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk	42 Kab/Kota	264 podcast	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
66	3	4	2	3		Penyusunan modul dan pengukuran perubahan perilaku secara online	42 Kab/Kota	1 modul	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
67	3	4	2	3		Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk.	42 Kab/Kota	22 produk	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
68	3	3	5	1	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pengembangan Telemedicine di RSUD dan Puskesmas	1. Keerom (RSUD Keerom) 2. Mamberamo Raya (RSUD Kawera)	4 RSUD dan 45 Puskesmas	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							3. Tolikara (RS Pratama Karubaga) 4. Manokwari (RS Pratama Warmare) 5. Kaimana (Puskesmas Waho, Puskesmas Kambala) 6. Manokwari (Puskesmas Prafi, Puskesmas Masni, Puskesmas Sidey) 7. Manokwari Selatan (Puskesmas Ransiki) 8. Maybrat (Puskesmas Ayamaru, Puskesmas Aifat) 9. Pegunungan Arfak					

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							(Puskesmas Anggi) 10. Sorong Selatan (Puskesmas Teminabuan, Puskesmas Moswaren) 11. Teluk Bintuni (Puskesmas Babo, Puskesmas Aranday) 12. Sorong (Puskesmas Klamono, Puskesmas Mayamuk, Puskesmas Makbon) 13. Fakfak (Puskesmas Karas, Puskesmas Bomberai) 14. Teluk Wondama					

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							(Puskesmas Wasior) 15. Raja Ampat (Puskesmas Waisai) 16. Nabire (Puskesmas Wanggarsari, Puskesmas SP1) 17. Biak Numfor (Puskesmas Ampobukor, Puskesmas Yomdori) 18. Mamberamo Tengah (Puskesmas Ilugwa) 19. Mappi (Puskesmas Kota I, Puskesmas Eci, Puskesmas Bade,					

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							Puskesmas Mur, Puskesmas Sahapikiya 20. Boven Digoel (Puskesmas Ninanti) 21. Mimika (Puskesmas Potowaibiru, Puskesmas Kokonao, Puskesmas Agimuga) 22. Yapen (Puskesmas Menawi, Puskesmas Mumbeai, Puskesmas Kosiwo) 23. Sarmi (Puskesmas Bonggo, Puskesmas Bonggo Timur, Puskesmas					

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							Betaf, Puskesmas Burtin, Puskesmas Sarmi) 24. Jayapura (Puskesma s Demta, Puskesmas Unurungu ay, Puskesmas Sawoy)					
69	3	3	5	1		Penyediaan Telemedicine di Papua	Lokus tahun 2021 adalah 3 fasyankes	18 Fasyankes	2021- 2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
70	3	3	5	1		Penyediaan Telemedicine di Papua Barat	Lokus tahun 2022 menunggu usulan dari Dinas Kesehatan Provinsi	11 Fasyankes	2021- 2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
71	3	3	5	2	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD Boven Digoel 2. RSUD Kaimana 3. RSUD Yowari Sentani 4. RSUD Nabire 5. RSUD Rumah Rodo Fabo 6. RSUD Paniai 	80 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
72	3	3	5	2		Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat	Papua dan Papua Barat	135 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
73	3	3	5	2		Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di	Papua dan Papua Barat	470 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
						Papua dan Papua Barat						
74	3	3	5	2	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Pelatihan Pelayanan Akupresur bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas (Dekonsentrasi)	Provinsi Papua	25 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
75	3	3	5	2		Pelatihan Pelayanan Akupresur bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas (Dekonsentrasi)	Provinsi Papua Barat	25 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
76	3	3	5	2		Pelatihan Uji Kompetensi Jabfung Kesehatan (Dekonsentrasi)	Papua dan Papua Barat	60 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
77	3	3	5	2		Pelatihan Surveilans Kesehatan Berbasis Epidemiologi Bagi Petugas	Papua dan Papua Barat	120 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
						Puskesmas (Dekonsentrasi)						
78	3	3	5	2		Pelatihan Promosi Kesehatan Bagi Petugas Puskesmas (Dekonsentrasi)	Papua dan Papua Barat	60 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
79	3	3	5	2		Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas (Dekonsentrasi)	Papua dan Papua Barat	600 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
80	3	5	3	1	Manajemen talenta Papua	Pengembangan Talenta Muda Papua dan Penyelenggaraan Kejuaraan di Tingkat Provinsi (menuju Nasional dan Internasional)	Provinsi Papua dan Papua Barat	680 peserta didik	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
81	3	5	3	1		Membangun dan mengembangkan sistem data base talenta muda Papua yang terintegrasi	Pusat	12.000 data entry	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
82	3	5	3	1		Penyusunan Modul Pelatihan: Nasionalisme, Kepemimpinan, pengembangan diri	Pusat	Penyusunan Kerangka Modul, FGD Modul Pelatihan, penerbitan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Modul	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
83	3	5	3	1		ToT Modul Pelatihan	Pusat	90 pelatih	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
84	3	5	3	1		Pendampingan dan pembinaan talenta muda Papua	Nasional	2.000 profil	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
85	3	5	3	1		Branding talenta	Nasional	288 publikasi	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
86	3	5	3	1		Distribusi talenta (Afirmasi Action untuk ASN, BUMN dan Perusahaan multinasional)	Nasional	1 regulasi/ Kebijakan	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
87	3	5	3	1		Gedung dan fasilitas penunjang serta operasional	Pusat	Diskusi lintas K/L, Pemda dan Universitas dan 11 Pusat Studi	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
88	3	5	3	1		Sekretariat MTP	Pusat	Gedung Sekretariat	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
89	3	5	3	1		Operasional sekretariat	Pusat	10 staf	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
90	3	4	3	3	Penguatan Kebijakan Khusus Untuk Guru	Pengangkatan Guru Honorer Sebagai Guru Tetap (P3K)	Provinsi Papua dan Papua Barat	Papua: 4669 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
								Papua Barat: 2.750 orang				
91	3	4	3	3		Rekrutmen Guru ASN	Provinsi Papua dan Papua Barat	Yahukimo: 758 Yalimo: 327 Papua Barat: Kab. Teluk Wondama: 313 Teluk Bintuni: 554 Maybrat: 144	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
								Pegunungan. Arfak: 420				
92	3	4	3	2		Guru Yang Mengikuti Pembinaan Sertifikasi Guru	Provinsi Papua dan Papua Barat	727 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
93	3	7	1	1		Revisi Spektrum Keahlian SMK (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018) dan Spektrum Keahlian SMK (Perdirjen Dikdasmen Nomor 07/D.D5/KK/2018)	Pusat	1 kebijakan	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
94	3	7	1	1		Revitalisasi Kurikulum: Pengembangan Kurikulum Keguruan Kompetensi Sosial Budaya (Sekolah Pendidikan Guru) Kolese Pendidikan Guru	1. Merauke 2. Mimika 3. Nabire 4. Sorong	Modul	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
95	3	7	1	1		Peserta Mengikuti Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIKES Jayapura 2. STIKES Papua 3. STMIK Kreatindo Manokwari 4. Univ Amal Ilmiah Yapis Wamena 5. Univ Kristen Papua 6. Univ. Muhammadiyah Sorong 7. STIE Port Numbay, STMIK Agama Wamena 8. STMIK 10 Nov JP 9. STKIP Kristen Wamena 	4.272 mahasiswa	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
96	3	5	3	1	Pembinaan Papua sebagai provinsi olahraga	Kegiatan Peningkatan Wawasan Pemuda/ Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Anti Faham Radikalisme	Papua dan Papua Barat (Online)	Orang	2021-2022	APBN dan APBD	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pendidikan
97	3	7	4	3		Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO/ Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan	Papua dan Papua Barat	Jumlah siswa atlet yang dibina dalam PPLP Provinsi Papua dan Papua Barat	2021-2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs
98	3	7	4	2		Pemanfaatan olahraga Eks PON XX dan PEPARNAS XVI 2020	Papua dan Papua Barat	Persentase	2021-2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
99	3	7	4	2		Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Nasional dan / atau Internasional dalam Rangka Mendukung Pemanfaatan Prasarana Olahraga PON XX dan PEPARNAS XVI 2020	Papua dan Papua Barat	Paket	2021- 2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs

b. Program Prioritas Tinggi Bidang Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir

No	PN / PP / KP / Pro P				Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
1	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Kawasan Sagu	1. Sorong Selatan 2. Sorong 3. Jayapura 4. Mimika 5. Mappi	Sorong Selatan 100 Ha; Sorong 100 Ha; Jayapura 100 Ha; Mimika 100 Ha, Mappi 200 Ha	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
2	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	1. Papua Barat 2. Fakfak 3. Kaimana 4. Teluk Wondama 5. Manokwari 6. Tambrau 7. Papua 8. Merauke 9. Jayawijaya 10. Nabire 11. Biak Numfor 12. Mimika 13. Boven Digoel 14. Sarmi	Papua Barat 2 Ha; Fakfak 21 Ha, Kaimana 4 Ha; Teluk Wondama 2 Ha; Manokwari 1 Ha; Tambrau 2 Ha; Papua 4 Ha; Merauke 6 Ha; Jayawijaya 1 Ha; Nabire 10 Ha; Biak Numfor 5 Ha, Mimika 5 Ha, Boven Digoel 1 Ha, Sarmi 5 Ha	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P				Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
3	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	1. Teluk Wondama 2. Teluk Bintuni 3. Manokwari	36 Unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
4	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	1. Teluk Wondama 2. Teluk Bintuni 3. Sorong 4. Sorong Selatan 5. Raja Ampat 6. Merauke 7. Jayapura 8. Kep. Yapen 9. Biak Numfor 10. Mimika 11. Mappi	31 Unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
5	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	1. Sorong 2. Manokwari Selatan 3. Jayawijaya	Sorong 2 unit; Manokwari Selatan 2 unit; Jayawijaya 2 unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
6	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	DAK Fisik Bidang Pertanian Provinsi	Provinsi Papua dan Papua Barat	861 paket	2021	DAK	Kementerian Pertanian; Pemerintah Daerah	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P				Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
7	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	DAK Fisik Bidang pertanian Kab/Kota	Provinsi Papua dan Papua Barat	254 Paket	2021	DAK	Kementerian Pertanian; Pemerintah Daerah	Kemiskinan
8	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	DAK Non Fisik Bidang Pertanian Kab/Kota	Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Paket	2021	DAK	Kementerian Pertanian; Pemerintah Daerah	Kemiskinan
9	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Pengadaan sarana pasca panen	Keerom	1 Paket	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
10	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	Manokwari	10 Unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
11	2	7	2	12	Program Petani Millenial	Database Program Petani Millenial	Provinsi Papua dan Papua Barat	20.000 Dokumen	2021-2022	APBN	Kantor Staf Presiden	Kemiskinan
12	2	7	2	12	Pengembangan Sentra Ternak	Hijauan Pakan Ternak	Provinsi Papua Barat	5 Lokasi	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
13	2	7	2	12	Pengembangan Sentra Ternak	Optimalisasi Reproduksi	Provinsi Papua dan Papua Barat	9.500 ekor	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
14	2	7	2	12	Pengembangan Sentra Ternak	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Provinsi Papua dan Papua Barat	6 Unit	2021	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
15	2	7	2	12	Sentra Kelautan	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	Biak Numfor	Tingkat Kemandirian 5	2021-2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P				Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
					Perikanan Terpadu (SKPT)	Biak Numfor yang mandiri						
16	2	7	2	12	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	Teluk Wondama	185 kelompok	2021-2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
17	2	7	2	12	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)	Prasarana yang dibangun di SKPT Biak	Biak Numfor	3 prasarana	2021	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
18	2	7	2	12	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)	Lembaga pengelola SKPT Mimika yang dibina dan dioperasikan	Mimika	1 lembaga	2021 – 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
19	2	7	2	12	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)	Tata kelola kelembagaan dan operasional SKPT Merauke yang Mandiri	Merauke	1 lembaga	2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
20	2	7	2	12	Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Provinsi Papua dan Papua Barat	640 orang	2021 – 2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
21	2	7	2	12	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	Fasilitasi penyelesaian masalah strategis di KEK Sorong	Sorong	1 badan usaha	2021 – 2022	APBN	Badan Koordinasi Penanaman Modal	SDGs
22	2	7	2	12	Pengembangan Kawasan	Fasilitasi Investor Dalam Rangka	Teluk Bintuni	1 kegiatan	2021 – 2022	APBN	Kementerian Perindustrian	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
					Strategis Nasional	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni						
23	2	7	2	12	Pengembangan DPP Raja Ampat	Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru	DPP Raja Ampat	2 lokasi DPP	2021 – 2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
24	2	7	2	12	Pengembangan DPP Raja Ampat	Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Branding dan Prioritas (destinasi)	DPP dan Destinasi Branding	12 destinasi	2021 – 2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
25	2	7	2	12	Pengembangan DPP Raja Ampat	Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Raja Ampat	1 destinasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
26	2	7	2	12	Pengembangan DPP Raja Ampat	Pusat Informasi Pariwisata berbasis Geopark	16 Geopark dalam DPP	3 unit	2021 – 2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
27	2	7	2	12	Pengembangan DPP Raja Ampat	Rencana Induk Pariwisata Destinasi	Raja Ampat	1 dokumen	2022	APBN	Kementerian Pariwisata	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P				Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
						Pariwisata Prioritas (ITMP)					dan Ekonomi Kreatif	
28	2	7	2	12	Pengembangan DPP Biak Teluk Cenderawasih	Pengembangan pariwisata bahari Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih	Teluk Wondama	1 paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
29	2	7	2	12	Pengembangan DPP Biak Teluk Cenderawasih	Penetapan Sail Teluk Cenderawasih	Biak Numfor	1 paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
30	2	7	2	12	Pengembangan DPP Biak Teluk Cenderawasih	Rehabilitasi kawasan situs budaya Gereja Tua Isna Jedi Yendi, dan Gua Tengkorak Roswar di Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih	Teluk Wondama	1 paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
31	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Puncak Jaya 2. Fakfak	2 kegiatan	2021	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
32	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1. Sorong 2. Keerom	1 kegiatan	2021	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
33	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	Pembangunan Balai Latihan Kerja	1. Manokwari 2. Biak Numfor 3. Mimika	3 BLK	2022	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan

No	PN / PP / KP / Pro P				Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
34	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	Pusat Pengembangan Keahlian/ <i>Skill Development Center</i> (Fungsi Pendidikan)	Kota Sorong	1 pusat pengembangan keahlian	2022	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
35	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	UKM yang ditingkatkan Kompetensinya melalui penguatan Kapasitas yang terstandar: Pelatihan Vokasional	1. Kota Jayapura 2. Kota Sorong 3. Manokwari	4 angkatan (120 orang)	2021 – 2022	APBN	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Usaha Mikro dan Kecil
36	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	Pelaksanaan Sekolah Pasar	Provinsi Papua dan Papua Barat	690 pengelola pasar	2022	APBN	Kementerian Perdagangan	Kemiskinan
37	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Provinsi Papua	710 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan

c. Program Prioritas Tinggi Bidang Infrastruktur Dasar dan Ekonomi

No	PN / PP / KP / Pro P / Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
1	5	2	1	1	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	Provinsi Papua	550,33 km	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
2	5	2	1	1		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	Provinsi Papua Barat	172,03 km	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
3	5	2	1	1		Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	Provinsi Papua	9606 km	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
4	5	2	3	1	Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Pengembangan Pelabuhan Sorong	Kota Sorong	1 unit	2021-2022	BUMN	PT. Pelindo IV, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
5	5	2	4	1	Pembangunan Airstrip dan Jembatan Udara 37 Rute di Papua	Pengembangan Bandara Elelim	Yalimo	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
6	5	2	4	1		Pemngembangan Bandara Wamena	Jayawijaya	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
7	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Tanah Merah	Boven Digoel	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
8	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Korowai Batu	Boven Digoel	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
9	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Nop Goliath	Yahukimo	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur

No	PN / PP / KP /Pro P/ Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P									
10	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Korupun	Yahukimo	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
11	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Mozes Kilangin	Mimika	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
12	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Oksibil	Pegunungan Bintang	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
13	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Ilaga	Puncak	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
14	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Mulia	1. Puncak Jaya	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
15	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Tiom	Lanny Jaya	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
16	5	2	4	5		Penyediaan Subsidi Perintis Penumpang, Kargo dan BBM	Papua	1 lokasi	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Kemiskinan	
17	5	2	4	1		Pengembangan Airstrip	Agandugume , Puncak	2021: 12 unit 2022: 1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
18	5	2	4	2		Pembangunan dan Pengembangan Bandara	Pembangunan Bandara Wasior Baru	Teluk Wondama	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
19	5	2	4	2			Pengembangan Bandara Marinda Waisai	Raja Ampat	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
20	5	2	4	2	Pengembangan Bandara Rendani		Manokwari	1 unit	2021-2022	APBN, SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
21	5	2	4	2	Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok		Kota Sorong	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
22	5	2	4	2	Pembangunan dan pengembangan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta	Raja Ampat	1 unit	2021-2022	APBN, SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	

No	PN / PP / KP / Pro P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P	Program							
23	5	2	4	2	pelabuhan penyeberangan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong	Sorong	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
24	5	2	4	2		Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat	Raja Ampat	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
25	5	2	1	6	Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pembangunan Jalan Trans Pulau Biak	Biak Numfor	27,1 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
26	3	4	2	1	Pembangunan gedung strategis (Istana Presiden, Papua Youth Creative Hub, Asrama Mahasiswa Nusantara, PLBN)	Penyusunan DED Asrama Mahasiswa Nusantara	1. Kota Surabaya 2. Kota Malang 3. Kota Makassar 4. Provinsi DKI Jakarta 5. Minahasa 6. Bantul	6 lokasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P/ Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
27	3	4	2	1	Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara	1. Kota Surabaya 2. Kota Malang 3. Kota Makassar 4. Provinsi DKI Jakarta 5. Minahasa 6. Bantul	6 lokasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	Infrastruktur
28	3	4	2	1	Pembangunan dan rehabilitasi gedung fungsi sosial dan keagamaan/Papua Youth Creative Hub	Kota Jayapura	1 Bangunan Papua Youth Creative Hub	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
29	-	-	-	-	Pembangunan Istana Kepresidenan	Kota Jayapura	Pembebasan Lahan, FS dan DED	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
30	7	5	1	3	Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu	PLBN Yatetkun, Boven Digoel	1 Kawasan	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P/ Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
31	5	5	1	1	Pengembangan Infrastruktur Pita Lebar	Palapa Ring	Provinsi Papua dan Papua Barat	30% pemanfaatan kapasitas Palapa Ring dengan rata-rata SLA 95%	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur
32	5	5	1	1		BTS/Lastmile	Provinsi Papua dan Papua Barat	452 unit eksisting, 5.204 unit baru	2021-2022	APBN, USO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur
33	5	5	1	1		Akses Internet	Provinsi Papua dan Papua Barat	1.236 unit eksisting, 6.229 unit baru	2021-2022	APBN, USO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur
34	5	4	2	2	Pembangunan Listrik Perdesaan	Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20kV	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	218,12 kms	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
35	5	4	2	2		Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 220 V	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	113,9 kms	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
36	5	4	2	2		Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL)	Provinsi Papua dan Papua Barat	478 unit	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
37	5	4	2	2				58 desa	2022			
38	5	4	2	2		Alat Penyimpan Daya Listrik (APDAL)	Provinsi Papua dan Papua Barat	12.586 unit	2022	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P / Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
39	5	4	2	2		Isolated/Komunal/Hybrid	Provinsi Papua dan Papua Barat	7.200 KW/KWp PLTS; 1.170 KW/KWp PLTD Hybrid	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
40	5	4	2	2				4.140,39 KW/KWp	2022			
41	5	1	1	1	Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman	Pembangunan rumah khusus	Provinsi Papua dan Papua Barat	573 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
							Provinsi Papua dan Papua Barat	372 unit	2021-2022	DAK		
42	5	1	1	3		Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Provinsi Papua dan Papua Barat	10.080 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
43	5	1	2	1								
44	5	1	2	1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Provinsi Papua dan Papua Barat	30 unit	2021-2022				
45	5	1	2	1	Sistem pengelolaan air limbah domestik Setempat Skala Individu	Provinsi Papua dan Papua Barat	12.000 unit	2021-2022				

d. Program Prioritas Tinggi Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

No	PN / PP / KP / Pro P/ Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
1	6	2	1	4	Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman	Kajian pemetaan dan analisis risiko bencana	Raja Ampat	1 kajian risiko bencana kawasan pariwisata yang disusun	2021	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
2	6	2	1	4	Bencana Terpadu serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang	Provinsi Papua dan Kab/Kota di Provinsi Papua	15 Dokumen Materi Teknis, Dokumen Buku Rencana, Album Peta, Rancangan Peraturan Daerah, dan Naskah Akademik	2021 - 2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	SDGs
3	6	2	1	4		Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang	Provinsi Papua Barat dan Kab/Kota di Provinsi Papua Barat	7 Dokumen Materi Teknis, Dokumen Buku Rencana, Album Peta, Rancangan Peraturan Daerah, dan Naskah Akademik	2021 - 2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	SDGs
4	6	2	1	6		Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik sektor permukiman dan infrastruktur	Provinsi Papua	2 Pendampingan	2021-2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P/ Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
5	6	2	1	6		Melaksanakan inventarisasi, verifikasi, dan pendampingan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan daerah terdampak pascabencana	1. Teluk Wonda 2. FakFak	2 Kegiatan	2021-2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
6	6	2	1	6		Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Provinsi Papua Barat	80 orang yang didampingi dalam mengkaji kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
7	6	1	3	3	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	1 lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	2022 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
8	3	6	3	1	Penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (termasuk Pelepasan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Pegunungan Arfak	2029,2 Hektar	2021	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P/ Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
					Kawasan Hutan)							
9	6	1	1	4	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rawan Karhutla	Provinsi Papua	32 desa rawan karhutla yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
10	6	1	1	4	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rawan Karhutla	Provinsi Papua Barat	28 desa rawan karhutla yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
11	6	1	1	4	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	Provinsi Papua	32 kegiatan pelaksanaan kegiatan pemadaman darat	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
12	6	1	1	4	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	Provinsi Papua Barat	28 kegiatan pelaksanaan kegiatan pemadaman darat	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
13	6	1	1	4	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH	Provinsi Papua dan Papua Barat	4 unit lembaga/komunitas yang melaksanakan gerakan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P/ Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P	Program							
								masyarakat bela lingkungan				
14	6	1	1	4	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH	Provinsi Papua dan Papua Barat	8 unit sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata)	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
15	6	1	1	6	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Operasional	Kawasan Konservasi Perairan di Prov Papua dan Papua Barat	5,53 juta ha kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	2021 - 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SDGs
16	1	4	2	1	Perlindungan wisata bahari dan jasa maritim	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	1. TWP Padaido (Papua) 2. SAP Raja Ampat 3. SAP Waigeo Sebelah Barat (Papua Barat)	1,17 juta ha luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P/ Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P								Program
17	1	4	2	1	Perlindungan wisata bahari dan jasa maritim	Kawasan Konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil (nasional dan daerah) yang ditetapkan	Papua Barat	1.610.298 ha Kawasan Konservasi baru	2021 - 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SDGs
18	6	2	1	1	Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di daerah	Provinsi Papua Barat	70 SDM yang mengikuti diklat teknis dan simulasi PB di daerah	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
19	6	2	1	1	Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Budaya Sadar Bencana	1. Biak 2. Numfor 3. Asmat 4. Mamberamo Raya 5. Dogiyai (2021) 6. Sorong 7. Jayapura (2022)	7 Kegiatan	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P/ Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P								Program
20	6	2	1	1	Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pusdalops bidang Data, informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana	Mamberamo Raya	1 Pengadaan	2021	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
21	6	1	4	3	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakkan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Kasus sengketa lingkungan hidup	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
22	6	1	4	3	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakkan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Kasus tindak pidana Lingkungan Hidup Kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Provinsi Papua dan Papua Barat	40 kasus	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P/ Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P								Program
24	6	1	4	3	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakkan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	PPNS LHK yang Ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	8 PPNS LHK (orang)	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
25	6	2	1	7	Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Penguatan Mitigasi Objek Ketangguhan	1. Manokwari 2. Nabire 3. Mimika 4. Kota Sorong	160 Kegiatan	2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
26	6	1	4	2	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakkan hukum bidang sumberdaya alam dan	Operasi pengamanan kawasan hutan	Provinsi Papua dan Papua Barat	16 operasi pengamanan kawasan hutan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P/ Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
					lingkungan hidup							
27	6	1	4	2	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakkan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Operasi peredaran Hasil Hutan Illegal	Provinsi Papua dan Papua Barat	18 operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
28	6	1	4	2	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakkan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup Kehutanan	Provinsi Papua dan Papua Barat	30 usaha/kegiatan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P	Program							
29	6	1	4	2	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakkan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	PPLH yang Ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	10 PPLH (orang)	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
30	6	2	2	1	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
31	6	2	2	1	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Rehabilitasi hutan mangrove	Provinsi Papua dan Papua Barat	75 Ha luas rehabilitasi hutan mangrove	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

e. Program Prioritas Tinggi Bidang Tata Kelola Pemerintahan, dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM

No	PN / PP / KP / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P	Program							
1	2	7	4	4	Pendampingan Desa	Pendampingan Desa	Provinsi Papua dan Papua Barat	5.917 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan	SDGs

No	PN / PP / KP/ Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
											Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
2	7	4	1	1	Manajemen Talenta ASN dan Anak Papua	Kebijakan afirmasi bidang perencanaan dan pengadaan SDM OAP pada K/L	Pusat	3 Kebijakan	2021-2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
3	7	4	1	1		Kebijakan afirmasi bidang perencanaan dan pengadaan SDM OAP untuk Mahasiswa dan Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan	Pusat	1 kebijakan (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
4	7	4	1	1		Pemagangan ASN Papua di K/L	Pusat	1 Surat Menteri	2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
5	7	4	4	2		Kebijakan afirmasi bidang perencanaan dan pengadaan SDM OAP pada K/L	Pusat	1 kebijakan	2021	APBN	Kementerian BUMN	SDGs
6	2	7	4	2		Pendampingan Pengembangan	Pusat	85 orang	2021-2022	APBN	Kementerian BUMN	SDGs

No	PN / PP / KP / Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
						Kinerja Bagi OAP di BUMN						
7	2	7	4	4	Pengembangan Desa Digital	Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD)	Provinsi Papua dan Papua Barat	450 desa	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
8	2	7	4	4		Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui Smart Village	Provinsi Papua dan Papua Barat	1 kebijakan (Pertahun)	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
9	2	7	4	4		Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	Provinsi Papua	200 desa	2021-2022	PHLN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
10	2	7	4	4		Desa Digital yang dikembangkan melalui Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Pendamping Desa (P3PD)	Provinsi Papua dan Papua Barat	9.028 Desa (2021) dan 15.000 Orang (2022)	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs

No	PN / PP / KP / Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
11	2	7	4	4		Desa Digital yang Dikembangkan Melalui Akademi Desa 4.0	Provinsi Papua dan Papua Barat	30.000 orang (pertahun)	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
12	3	6	3	2	Penataan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	Penataan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	Provinsi Papua dan Papua Barat	28.000 bidang	2021-2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah	SDGs
13	3	6	3	2		Kepastian hukum dan legalisasi Hak Atas Tanah Adat	Pusat	33 Kantor Wilayah (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah	SDGs

No	PN / PP / KP / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P	Program							
14	7	1	3	1	Penyusunan Narasi Tunggal Papua	Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat	Pusat, Provinsi Papua dan Papua Barat	207 Spot/ Kegiatan	2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Luar Negeri	SDGs

Keterangan:

- PN : Prioritas Nasional.
PP : Program Priritas.
KP : Kegiatan Priritas.
Pro P : Proyek Prioritas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati